

**PENGARUH MEDIA DAN STRUKTUR
CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
KUALITAS *ENVIRONMENTAL DISCLOSURE***



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)

pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

NURANI PRASETIANTI

NIM. 12030110120007

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2014

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Nurani Prasetianti
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110120007
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH MEDIA DAN STRUKTUR
CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
*KUALITAS ENVIRONMENTAL
DISCLOSURE***
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Muchammad Syafruddin, M.Si, Akt

Semarang, 10 Februari 2014

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si.,Akt

NIP. 19620416 198803 1003

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Nurani Prasetianti
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110120007
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH MEDIA DAN STRUKTUR
CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
KUALITAS *ENVIRONMENTAL*
*DISCLOSURE***

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 27 Februari 2014

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt (.....)
2. Dr.P.Basuki Hadiprajitno,MBA,MSAcc., Akt (.....)
3. Adityawarman, S.E., M.Acc., Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Nurani Prasetianti, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Pengaruh Media dan Struktur *Corporate Governance* terhadap Kualitas *Environmental Disclosure***, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 10 Februari 2014

Yang membuat pernyataan,

Nurani Prasetianti

NIM. 12030110120007

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the influence of media coverage and corporate governance structure characteristics like independent commissioner, gender diversity, multiple-directorship, board size, and institutional investor on environmental disclosure quality. Profitability, firm size, industry characteristics, and sustainability report used as control variable.

The population in this study consists of all listed firm in Indonesia Stock Exchange in year 2010, 2011, and 2012. Sampling method used is purposive sampling. A criterion for firm which include of high profile industry such as mining, energy, chemical, pharmacy, household, and food and beverages. Another criteria is the firm must make and publish corporate social responsibility report. Total data of this study is 150 data. Then, there are 26 samples that include outlier should be excluded from samples of observation. So, the final amounts of the sample are 124 data. Multiple regression used to be analysis technique.

The empirical result of this study show that media coverage, independent commissioner, gender diversity, and board size have positively significant influenced on environmental disclosure quality on total disclosure. Institutional investor have negatively influenced on environmental disclosure quality.

Keyword : *environmental disclosure, environmental performance, environmental strategy, media coverage, corporate governance, industry characteristics.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari liputan media dan karakteristik struktur *corporate governance* seperti dewan komisaris independen, keberagaman gender, *multiple-directorship*, ukuran dewan komisaris dan investor institusional terhadap kualitas *environmental disclosure*. Penelitian ini menggunakan tiga variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, ukuran profitabilitas, jenis industri, dan laporan keberlanjutan.

Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010,2011,dan 2012. Metode sampling dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Kriteria perusahaan yang digunakan merupakan perusahaan industri *high profile* yaitu pertambangan, energi, kimia, farmasi, kosmetik dan makanan dan minuman. Perusahaan yang dijadikan sampel harus membuat dan menerbitkan laporan tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga jumlah total sampel dalam penelitian ini adalah 150 data. Setelah melalui tahap pengolahan data, terdapat 26 data *outlier* yang harus dikeluarkan dari sampel penelitian, sehingga jumlah sampel akhir yang layak diobservasi yaitu 124 data. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda.

Hasil analisis menunjukkan bahwa liputan media, dewan komisaris independen, keberagaman gender, dan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas *environmental disclosure* pada skor total. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kualitas *environmental disclosure*.

Kata kunci : pengungkapan lingkungan, kinerja lingkungan, strategi lingkungan, liputan media, tata kelola perusahaan, karakteristik industri.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila
engkau telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan
sungguh-sungguh bekerja (urusan), dan hanya kepada Tuhanmu lah
hendaknya engkau berharap.*

(Q.S. al –Insyirah 5-8)

Fall in love only when you're ready, not when you're lonely

(Ameri Ichinose)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Bapak,Ibu dan Adik-adikku tercinta

Sahabat dan teman – teman ku sayang

Keluarga besar Akuntansi 2010

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan rahmatNya sehingga penelitian dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya campur tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan dan dukungan yang begitu besar dari :

1. Bapak Prof. H. Mohamad Nasir, M.Si., Akt.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan nasihat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
3. Mbak Nanik Sri Utaminingsih dan Mas Andrian Budi Prasetyo. Terima kasih atas bimbingan, arahan, dan masukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Wahyu Meiranto, S.E., M.Si.,Akt selaku dosen wali.
5. Semua dosen dan staff tata usaha yang telah membantu kelancaran penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
6. Orang tua tercinta, Bapak Budiman dan Ibu Nunuk serta Adik-Adikku Adit dan Agil, terima kasih atas doa yang dipanjatkan, serta dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan kepada penulis.
7. Sahabat-Sahabatku, Vanessa, Watek, Raras, Norma, Depi, Winda, Vita, Lies, Haniatun, Aisha, Risa, Icha Risalawati, Natasya dan seluruh keluarga besar Akuntansi Undip 2010. Terima kasih atas dukungan dan semangat yang diberikan.

8. Terima kasih untuk seluruh moi-moi Mosha. Terima kasih untuk kasih sayang, dukungan, waktu, dan semangat yang diberikan kepada penulis.
9. Jaya, Ucup, Irwan, Aritama, Kunto, Oweh, David, Putri, Aish, Anas dan Januwar, terima kasih atas pengalaman dan kebersamaan selama berproses di organ intra.
10. Arief Raharjo, terima kasih atas dukungan, kritik dan saran yang telah diberikan selama proses menyelesaikan kuliah. Terima kasih kepada seluruh Mas dan mbak Gmni komisariat FE. Terima kasih atas tumpangan sekre selama proses pembuatan skripsi. Mbak Niken dan mas putra yang telah memberikan arahan mengenai SPSS. Mbak Wulan, Mas Annas, Mas Salman, Mas Ucil, Mas Theo, Mas Andi, Terima kasih atas arahan dan bimbingan selama berproses di bangku kuliah.
11. The Amrta Homestay: Mbak Niken, Ayu, Rosi, Tiwi, Arini, Alda dan Ika. The Ismail's : Arum, Mbak Nad, Azi, Riris, dan Rini. Terima kasih atas dukungannya selama ini.
12. Seluruh kerabat, teman, pihak-pihak yang sudah membantu namun tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas bantuan dan doanya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan sebagai input bagi penulis agar dapat menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 10 Februari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
1.4 Sistematika Penulisan	14
BAB II TELAAH PUSTAKA	16
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	16
2.1.1 Teori Legitimasi.....	16
2.1.2 Kinerja Lingkungan	19
2.1.3 Kualitas <i>Environmental Disclosure</i>	21
2.1.4 <i>Environmental Disclosure Index Scorecard</i>	25
2.1.5 Jenis-jenis Pengungkapan	27

2.1.6 <i>Environmental Media</i>	29
2.1.7 Teori Agensi.....	31
2.1.8 <i>Corporate Governance</i>	33
2.1.8.1 Definisi <i>Corporate Governance</i>	33
2.1.8.2 Asas <i>Corporate Governance</i>	35
2.1.9 Karakteristik Struktur <i>Corporate Governance</i>	36
2.1.9.1 Dewan Komisaris.....	36
2.1.9.2 Komisaris Independen	37
2.1.9.3 Keberagaman Gender	39
2.1.9.4 <i>Multiple-Directorship</i>	40
2.1.9.5 Investor Institusional (Kepemilikan Institusional)	41
2.1.10 Penelitian Terdahulu	42
2.2 Kerangka Pemikiran.....	47
2.3 Hipotesis	52
2.3.1 <i>Environmental Media</i>	52
2.3.2 Karakteristik Dewan Komisaris	54
2.3.3 Investor Institusional.....	60
BAB III METODE PENELITIAN	63
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	63
3.1.1 Variabel Dependen.....	63
3.1.2 Variabel Independen	65
3.1.2.1 <i>Environmental Media</i>	65
3.1.2.2 Karakteristik Dewan Komisaris.....	67
3.1.2.3 Investor Institusional.....	68
3.1.3 Variabel Kontrol	68
3.2 Populasi dan Sampel	70
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	71

3.4 Metode Pengumpulan Data	72
3.5 Metode Analisis	72
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif	72
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	72
3.5.2.1 Uji Normalitas.....	73
3.5.2.2 Uji Multikolonieritas.....	74
3.5.2.3 Uji Heteroskedasitas	75
3.5.2.4 Uji Autokorelasi.....	76
3.5.3 Regresi Berganda (<i>Multiple Regression</i>)	77
3.5.4 Uji Hipotesis	79
3.5.4.1 Uji Statistik F	78
3.5.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	79
3.5.4.3 Uji Statistik t	80
BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....	82
4.1 Deskripsi dan Objek Penelitian.....	82
4.2 Analisis Data	84
4.2.1 Statistik Deskriptif	84
4.2.2 Analisis Regresi Linear Berganda	93
4.2.3 Uji Asumsi Klasik.....	95
4.2.3.1 Uji Normalitas.....	95
4.2.3.2 Uji Multikolinieritas	106
4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas	107
4.2.3.4 Uji Autokorelasi.....	110
4.2.4 Hasil Pengujian Hipotesis	112
4.2.4.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	112
4.2.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	114
4.2.4.3 Model dan Uji t	120

4.3 Interpretasi Hasil	190
4.3.1 Environmental Media.....	190
4.3.2 Karakteristik Dewan Komisaris.....	195
4.3.3 Kepemilikan Institusional (Investor Institiusional)	205
4.3.4 Variabel Kontrol	207
BAB V PENUTUP.....	212
5.1 Kesimpulan	212
5.2 Keterbatasan.....	216
5.3 Saran	217
DAFTAR PUSTAKA	219
LAMPIRAN.....	223

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 <i>A Natural-Resource-Based View: Conceptual Framework</i>	22
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	45
Tabel 3.1 Definisi Variabel.....	69
Tabel 4.1 Perincian Sampel.....	83
Tabel 4.2 Deskriptif Statistik	85
Tabel 4.3 One Sample Kolmogrov-Sminorv Test.....	104
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas	106
Tabel 4.5 Hasil Uji Glejser (Panel A dan Panel B).....	108
Tabel 4.6 Hasil Uji Glejser (Panel C dan Panel D).....	108
Tabel 4.7 Hasil Uji Glejser (Panel E)	109
Tabel 4.8 Hasil Run Test.....	110
Tabel 4.9 Hasil Uji F.....	113
Tabel 4.10 Hasil Uji Determinasi.....	115
Tabel 4.11 Hasil Uji t (PANEL A).....	121
Tabel 4.12 Hasil Uji t (PANEL B).....	134
Tabel 4.13 Hasil Uji t (PANEL C).....	147
Tabel 4.14 Hasil Uji t (PANEL D).....	161
Tabel 4.15 Hasil Uji t (PANEL E)	175
Tabel 4.16 Matrik Ringkasan Hasil Uji Regresi	189

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Perbandingan Jumlah Protes Lingkungan Hidup Satu Dekade	6
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	51
Gambar 4.1 Histogram Normalitas Model 1 Regresi DQ_TOTAL	96
Gambar 4.2 Histogram Normalitas Model 2 Regresi DQ_TOTAL	96
Gambar 4.3 Histogram Normalitas Model 1 Regresi DQ_COMP	97
Gambar 4.4 Histogram Normalitas Model 2 Regresi DQ_COMP	97
Gambar 4.5 Histogram Normalitas Model 1 Regresi DQ_POLLPREV	97
Gambar 4.6 Histogram Normalitas Model 2 Regresi DQ_POLLPREV	98
Gambar 4.7 Histogram Normalitas Model 1 Regresi DQ_PRODSTEW	98
Gambar 4.8 Histogram Normalitas Model 2 Regresi DQ_PRODSTEW	98
Gambar 4.9 Histogram Normalitas Model 1 Regresi DQ_SUSDEV	99
Gambar 4.10 Histogram Normalitas Model 2 Regresi DQ_SUSDEV	99
Gambar 4.11 Normal Probability Plot Model 1 Regresi DQ_TOTAL	99
Gambar 4.12 Normal Probability Plot Model 2 Regresi DQ_TOTAL.....	100
Gambar 4.13 Normal Probability Plot Model 1 Regresi DQ_COMP	100
Gambar 4.14 Normal Probability Plot Model 2 Regresi DQ_COMP	100
Gambar 4.15 Normal Probability Plot Model 1 Regresi DQ_POLLPREV.....	101
Gambar 4.16 Normal Probability Plot Model 2 Regresi DQ_POLLPREV.....	101
Gambar 4.17 Normal Probability Plot Model 1 Regresi DQ_PRODSTEW ...	101
Gambar 4.18 Normal Probability Plot Model 2 Regresi DQ_PRODSTEW ...	102
Gambar 4.19 Normal Probability Plot Model 1 Regresi DQ_SUSDEV	102
Gambar 4.20 Normal Probability Plot Model 2 Regresi DQ_SUSDEV	102

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN A DAFTAR SAMPEL PERUSAHAAN	223
LAMPIRAN B STATISTIK DESKRIPTIF	225
LAMPIRAN C UJI NORMALITAS	226
LAMPIRAN D UJI MULTIKOLINEARITAS	241
LAMPIRAN E UJI HETEROSKRDATISITAS	247
LAMPIRAN F UJI AUTOKORELASI.....	253
LAMPIRAN G UJI REGRESI	257
LAMPIRAN H <i>Environmental Disclosure Index Scorecard</i>	272
LAMPIRAN I TABULASI DATA.....	281

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini akan dibahas alasan yang menjadi latar belakang masalah mengenai sebab-sebab dilakukannya penelitian tentang media dan struktur *corporate governance* dihubungkan dengan kualitas *environmental disclosure* pada perusahaan di Indonesia. Latar belakang tersebut menjadi landasan rumusan penelitian yang akan menjadi fokus penelitian. Selanjutnya dibahas mengenai tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan yang akan diuraikan pada bab ini.

1.1 Latar Belakang

Laporan tahunan merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan. Pelaporan ini ditujukan sebagai pertanggung jawaban kepada pemegang saham (*shareholder*). Namun akhir-akhir ini telah terjadi pergeseran fungsi pelaporan tahunan perusahaan, yang tadinya ditujukan hanya kepada *shareholder* beralih pada kepentingan *stakeholder* baik *shareholder* maupun *non-shareholder*. Oleh karena itu disamping memenuhi kepentingan para *shareholder*, perusahaan harus memperhatikan kepentingan para *stakeholder* lain baik dari segi sosial, lingkungan maupun ekonomi. Terutama masalah sosial dan lingkungan yang seringkali diabaikan oleh perusahaan. Kurangnya perhatian perusahaan terhadap dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas industri dimulai dari proses perolehan bahan baku, pengolahan, hingga hasil produk dimana hal ini dapat meningkatkan pencemaran lingkungan. Permasalahan ini menyebabkan

permintaan akan pengungkapan lingkungan semakin meningkat. Peningkatan pengungkapan lingkungan di dukung dengan permintaan para *stakeholder* akan transparansi dan akuntabilitas.

Isu-isu mengenai lingkungan di tingkat internasional menyebabkan perhatian terhadap lingkungan telah berkembang pesat dan diiringi dengan peningkatan pelaporan lingkungan oleh perusahaan. Penelitian di *United States*, survei dari konstituen menunjukkan bahwa pelaporan lingkungan secara sukarela oleh perusahaan meningkatkan ketertarikan masyarakat pada perusahaan tersebut. *Securities and Exchange Commission* juga membuat pedoman yang berhubungan dengan resiko bisnis dan perubahan iklim (SEC, 2010). Senat Amerika memeriksa penanganan isu pengungkapan lingkungan perusahaan dan kelompok investasi media yang berkelanjutan untuk mengungkapkan informasi lingkungan lebih lanjut (CERES,2009 dalam Rupley, *et al.*, 2012). Tindakan ini menunjukkan sebuah peluang peningkatan tentang informasi pengungkapan lingkungan tentang operasi perusahaan untuk keputusan investor maupun manajer, beberapa persyaratan pengungkapan berhubungan dengan beban lingkungan dan pencemaran emisi toxic di United States dan pelaporan lingkungan yang selektif disyaratkan untuk beberapa negara (KPMG, 2008 dalam Rupley, *et al.*,2007).

Berbagai regulasi di tingkat internasional telah banyak diterbitkan untuk mengatasi pencemaran lingkungan seperti *United States Environmental Protection Agency (US EPA)* yang mengeluarkan data *Toxics Release Inventory (TRI)*, *International Organization for Standardization* yang menetapkan ISO 1400

tentang sistem manajemen lingkungan, *Global Reporting Initiative (GRI)* yang mengeluarkan pedoman pelaporan pengungkapan lingkungan. Perusahaan sedang gencar-gencarnya melakukan pelaporan lingkungan untuk kepentingan para *stakeholder*. Pengungkapan lingkungan ini bertujuan agar perusahaan mendapatkan legitimasi dari para *stakeholder*, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan.

Pelaporan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia telah menjadi kewajiban bagi perseroan terbatas untuk mengungkapkan dalam laporan keberlanjutan maupun dalam laporan tahunan. Laporan keberlanjutan (*sustainability report*) atau laporan *corporate sosial responsibility (csr)* bersifat *mandatory* tercermin dalam undang-undang perseroan terbatas. Undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 66 dan 74, pada pasal 66 ayat 2 bagian c tertulis bahwa dalam laporan tahunan diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sedangkan pasal 74 ayat 1 tertulis bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain regulasi dari pemerintah, secara tersirat Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam pernyataan standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 (2012) paragraf 9 menyarankan untuk mengungkapkan tanggung jawab akan masalah sosial dan lingkungan. PSAK nomor 1 (2012) paragraf 9 menyatakan :

“Entitas dapat pula menyajikan laporan yang terpisah dari laporan keuangan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang

menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”.

Di Indonesia, melaksanakan dan melaporkan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan publik. Namun, format pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan belum diregulasi. Hal ini menyebabkan laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan antar perusahaan masih bervariasi. Uraian di atas mengindikasikan bahwa di Indonesia wajib membuat laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan akan tetapi format dan bentuk pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan bersifat sukarela.

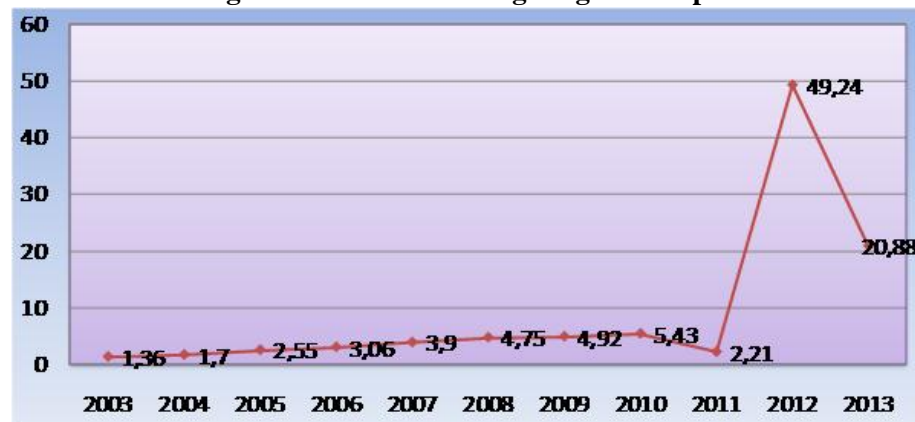
ISRA (*Indonesia Sustainability Reporting Award*) dalam *antaranews.com* memberikan data bahwa di tahun 2005 tercatat 1 perusahaan yang membuat laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara terpisah dan di tahun 2012 sudah ada 40 perusahaan yang membuat laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara terpisah. Data tersebut menunjukkan ketika pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan masih bersifat *voluntary* hanya terdapat 1 perusahaan yang membuat laporan tersebut, setelah adanya landasan hukum tentang pembuatan laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan terjadi peningkatan pembuatan laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun peningkatan tersebut masih tergolong minim jika dibandingkan dengan perusahaan publik yang tercatat di bursa efek pada tahun 2012 yaitu kurang lebih terdapat 461 emiten.

Minimnya pembuatan pelaporan tanggung jawab dan lingkungan oleh perusahaan publik, diiringi dengan peningkatan kasus-kasus perusahaan lingkungan oleh perusahaan publik di Indonesia yang disebabkan dari aktivitas-

aktivitas yang dilakukan perusahaan. Kasus banjir lumpur lapindo panas, Lapindo Brantas Inc di Sidoarjo, Jawa Timur yang merusak ribuan hektar mata pencaharian penduduk, akan tetapi masih dapat beroperasi di bursa efek. Masalah pemberdayaan masyarakat suku di wilayah pertambangan Freeport di Papua, pencemaran Teluk Buyat di Minahasa Selatan oleh PT. Newmont Minahasa Raya, dan pencemaran minyak akibat kebocoran pipa di Tanjung Miring Timur oleh PT Gold Water. Kasus-kasus di atas mencerminkan kurangnya kualitas pengungkapan lingkungan dan masih minimnya pembuatan laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perseroan terbatas di Indonesia. Kasus-kasus tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran perusahaan terhadap lingkungannya. Oleh Karena itu, perusahaan harus memperhatikan tanggung jawab terhadap lingkungan disekitarnya dan diperlukan pengungkapan lingkungan agar perusahaan lebih mendapatkan legitimasi dari masyarakat dan para *stakeholder* .

WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) memberikan data bahwa selama tahun 2011 terdapat 107 kasus pelanggaran lingkungan hidup, tahun 2012 terdapat 118 kasus, tahun 2013 sampai bulan Maret terdapat 4 pelanggaran. Dari sejumlah pelanggaran, 70% berbuntut konflik yang meluas. Munculnya konflik ini, akibat rendahnya kualitas tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta rendahnya pengungkapan lingkungan. Grafik berikut ini menjelaskan bahwa masalah lingkungan dan pengungkapan merupakan masalah besar di Indonesia.

Gambar 1.1 Perbandingan Jumlah Protes Lingkungan Hidup Satu Dekade



Sumber : Walhi 2013

Melihat kondisi di atas, keadaan lingkungan ekonomi mengalami perubahan dan perubahan ini berdampak pada dunia usaha. Agar perusahaan dapat lebih bersaing, maka harus lebih transparan dalam mengungkapkan informasi perusahaan baik dari sisi kinerja sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Pengungkapan lingkungan berpengaruh kepada para *stakeholder* baik *shareholder* maupun *non-shareholder* dalam berbagai kepentingannya masing-masing yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan (*decision making*) selain dari segi finansial.

Sebagian besar pengungkapan lingkungan secara sukarela yang dibuat oleh manajemen ditujukan kepada *board of director* dan *shareholder*, digunakan untuk pengambilan keputusan (Millstein,1991 dalam Rupley, *et al.*,2012). *Board of director* jika diterapkan di Indonesia adalah dewan komisaris, disesuaikan pada keadaan perusahaan-perusahaan di Indonesia yang mengacu sistem *Two Tier Board System*. Dewan komisaris merupakan salah satu bagian dari *corporate governance*. *Corporate governance* adalah tata kelola yang dilakukan oleh *stakeholder* dalam melakukan kontrol terhadap manajemen, yang

bertujuan untuk melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan transparansi perusahaan (Rupley, *et al.*,2012). *Corporate governance* yang dilakukan secara langsung berupa pengawasan dari dewan komisaris, yang mewakili *shareholder*. Selain dewan komisaris, terdapat *stakeholder* lain meliputi *intititutional investor, lender, regulator, governmental agencie*, organisasi *non-governmental*, asosiasi bisnis, *customer*, dan pemasok, yang akan mempengaruhi keputusan manajemen. *Stakeholder* dapat menjalankan fungsi *governance* dalam hal pengaruh pengawasan untuk pengambilan keputusan manajemen, hal ini tergantung pada kuatnya hubungan *stakeholder* dengan perusahaan.

Pengungkapan lingkungan ditujukan kepada *stakeholder* untuk membantu dalam pengambilan keputusan *stakeholder*. *Stakeholder* dikelompokkan menjadi dua yaitu *shareholder* dan *non-shareholder*. Fokus utama *shareholder* adalah tertuju pada kesuksesan perusahaan secara finansial, sedangkan *non-shareholder* seringkali mempeoleh isu-isu yang secara tidak langsung berhubungan dengan kesuksesan perusahaan selain dari sisi finansial (contoh : *environmental stewardship, company partnerships*, dll). Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan akan mengkomunikasikan informasi ke berbagai *stakeholder* untuk menyesuaikan harapan masyarakat terhadap perusahaan (Ashforth dan Gibbs, 1990 dalam Rupley, *et al.*,2012). *Environmental media*, sebagai atribut *external* dari perusahaan menunjukkan komitmen perusahaan terhadap lingkungannya. Berdasarkan Bansal dan Clelland (2004) menyatakan bahwa *environmental legitimacy* perusahaan yang didasarkan pada isu-isu liputan media tentang lingkungan, sebagai sebuah potensi penilaian cara kerja *governance*. Media adalah

sebagai proksi untuk menggambarkan beberapa aspek dari *non-shareholder* dan meneliti hubungan media dengan kualitas *environmental disclosure* (ED).

Untuk meneliti pengaruh *shareholder stakeholders'* dalam manajemen, menggunakan dewan komisaris dan atribut investor institusional yang dihubungkan dengan kualitas *environmental disclosure*. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa *corporate governance* menunjukkan luasnya dan metode pengungkapan lingkungan yang dibuat oleh perusahaan. Ajinkya, *et al.* (2005) menemukan bukti yang konsisten bahwa *governance* yang lebih kuat (contoh : *board independence* dan *institutional ownership*) menunjukkan pengungkapan lingkungan yang lebih transparan dari perkiraan manajemen. Rao, *et al.* (2011) menyatakan independensi dari *board of director* berhubungan secara positif dengan pengungkapan lingkungan. *Corporate governance* sebagai proksi untuk menggambarkan *shareholder stakeholders'* dibagi menjadi dua yaitu karakteristik dewan komisaris dan investor institusional. Karakteristik dewan komisaris meliputi dewan komisaris independen, keberagaman gender, *multiple directorships*, dan ukuran dewan komisaris.

Penelitian ini berdasarkan pada penelitian sebelumnya tentang pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, yang secara spesifik dalam lingkup pengungkapan lingkungan. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Rupley, *et al.* (2012) yang meneliti tentang media, *corporate governance*, dan kualitas pengungkapan lingkungan secara sukarela. Plumlee, *et al.* (2009) meneliti tentang hubungan pengungkapan lingkungan dengan nilai perusahaan. Penelitian

mengenai hubungan pengungkapan lingkungan dengan kinerja lingkungan dilakukan oleh Clarkson, *et al.* (2008)

Penelitian ini meneliti kualitas *environmental disclosure* dengan pengukuran kuantitatif dan kualitatif dihubungkan dengan isu-isu lingkungan pada perusahaan, yang ditujukan kepada berbagai macam *stakeholder* dengan informasi lingkungan sesuai aturan yang berlaku. Kualitas *environmental disclosure* digambarkan menggunakan substansi dan indikator lingkungan yang di laporkan oleh perusahaan. Marshall dan Brown (2003) menyatakan tentang bagaimana informasi lingkungan disajikan, meliputi target atau fungsi produksi, meningkatkan transparansi, dan isi informasi. Sebagai contoh, perusahaan mungkin menyajikan semua limbah yang dikeluarkan untuk air, semua limbah yang dikeluarkan untuk air sebagai presentase total produksi, atau semua limbah yang dikeluarkan untuk air sebagai presentase dari total produksi dengan perbandingan tahun lalu. Ketiga indikator ini adalah kualitas yang berbeda dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Kualitas *environmental disclosure* diukur dengan cara mengidentifikasi informasi yang disajikan, berdasarkan dalam peningkatan tingkat kegunaan dari strategi lingkungan dan manajemen.

Kualitas *environmental disclosure* menurut Rupley, *et al.* (2012) terbagi menjadi empat kategori yaitu *compliance*, *pollution prevention*, *product stewardship*, dan *sustainable development*. Pembagian kategori ini didasarkan pada tingkat kepatuhan dan kualitas pengungkapan lingkungan. *Compliance* menunjukkan tingkat kepatuhan dimana perusahaan mengungkapkan lingkungan hanya berdasarkan kewajiban akan regulasi yang mengatur untuk mengungkapkan

tanggung jawab perusahaan pada lingkungan. *Pollution prevention* perusahaan mulai mulai pencegahan terhadap polusi pencemaran terhadap lingkungan. *Product stewardship*, pada tahap ini perusahaan mulai menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan dalam proses produksi dan mulai melakukan daur ulang dalam proses produksi. *Sustainable development* merupakan tingkatan yang paling baik dimana perusahaan telah melakukan keempat tingkatan pengungkapan lingkungan dan telah melakukan tanggung jawab terhadap lingkungan secara berkelanjutan seiring dengan pertumbuhan perusahaan. Kualitas *environmental disclosure* (ED) akan menjadi variabel dependen dari penelitian ini.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Rupley, *et al.* (2012) yang meneliti tentang pengaruh *governance*, media, dan kualitas *voluntary environmental disclosure* dengan sampel perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat dan disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada karakteristik dewan komisaris dan karakteristik investor institusional. Di Indonesia penelitian tentang pengungkapan lingkungan juga telah banyak dilakukan, namun masih terdapat *research gap* yaitu terletak pada variabel dependen pada penelitian ini yang mengimplementasikan *environmental disclosure index scorecard* yang lebih menunjukkan kualitas *environmental disclosure* dibandingkan dengan menggunakan pengukuran *dummy*. Pengukuran variabel dependen ini lebih menggambarkan kualitas pengungkapan lingkungan berdasarkan strategi manajemen lingkungan.

Berdasarkan latar belakang di atas, variabel independen yaitu atribut-atribut media, karakteristik dewan komisaris dan investor institusional dapat

mempengaruhi variabel dependen yang mengukur kualitas pengungkapan lingkungan menggunakan *environmental disclosure index scorecard* pada perusahaan-perusahaan publik di Indonesia yang membuat laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan baik dalam laporan keberlanjutan maupun dalam laporan tahunan.

1.2 Rumusan Masalah

Pengungkapan lingkungan di Indonesia bukanlah fenomena yang asing lagi, namun isu mengenai lingkungan selalu berkembang dari tahun ke tahun. Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang biasanya disebut dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan mekanisme suatu organisasi untuk memberikan perhatiannya kepada terhadap lingkungan dan sosial di sekitarnya. *Environmental disclosure* merupakan bentuk pertanggung jawaban perusahaan terhadap tanggung jawab sosial yang telah dilakukan untuk masyarakat. *Environmental disclosure* menunjukkan transparansi perusahaan sehingga dapat digunakan oleh *stakeholder* dalam pengambilan keputusan. Sejak tahun 2007, di Indonesia sudah mulai diterbitkan regulasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan.

Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan akan mengkomunikasikan informasi ke berbagai *stakeholder* untuk menyesuaikan dengan harapan masyarakat (Ashforth dan Gibbs, 1990 dalam Rupley, *et al.*, 2012). Berdasarkan Bansal dan Clelland (2004) menyatakan bahwa *environmental legitimacy* perusahaan yang didasarkan pada isu-isu liputan media tentang lingkungan,

sebagai sebuah potensi cara kerja *governance*. Media ini digunakan untuk menilai atribut eksternal perusahaan dari sisi *non-shareholder*.

Teori agensi menyatakan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara manajemen sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Prinsipal memperkerjakan agen untuk bekerja demi kepentingan prinsipal, sedangkan agen memaksimalkan kepentingan individu demi keuntungan pribadi. Salah satu cara untuk memonitor masalah agensi dan mengurangi oppurtunistik manajer adalah dengan menggunakan tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Perusahaan yang melaksanakan *good corporate governance* sudah seharusnya melaksanakan aktivitas CSR sebagai wujud kepedulian perusahaan pada lingkungan sosial (Rustiarini,2010). Karakteristik *corporate governance* seperti pengawasan oleh dewan komisaris dan pemisahan struktur kepemilikan.

Berdasarkan masalah diatas, penelitian ini akan meneliti tentang pengaruh media dan struktur *corporate governance* dalam kualitas *environmental disclosure*. Pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah karakteristik *environmental media* berpengaruh terhadap kualitas *environmental disclosure*?
2. Apakah karakteristik dewan komisaris berpengaruh terhadap kualitas *environmental disclosure*?
3. Apakah investor institusional berpengaruh terhadap kualitas *environmental disclosure*?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh antara :

1. Variabel-variabel karakteristik *environmental media* terhadap kualitas *environmental disclosure*
2. Variabel-variabel karakteristik dewan komisaris terhadap kualitas *environmental disclosure*
3. Variabel investor institusional terhadap kualitas *environmental disclosure*

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi *stakeholder*, akan memberikan wacana baru dalam mempertimbangkan aspek-aspek yang perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan yang tidak terpaku pada ukuran-ukuran moneter.
2. Bagi perusahaan, dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya *environmental disclosure* di dalam laporan tahunan perusahaan, maupun dalam laporan yang terpisah dari laporan tahunan (*sustainability report*) dan sebagai pertimbangan perusahaan dalam pembuatan kebijakan perusahaan untuk lebih meningkatkan kepeduliannya pada lingkungan sosial. Selain itu, penelitian ini dapat juga memberikan gambaran mengenai pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan.
3. Bagi masyarakat, akan memberikan stimulus sebagai kontrol sosial atas perilaku-perilaku perusahaan dan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak yang harus diperoleh.
4. Bagi lembaga-lembaga pembuat peraturan/standar, misalnya Bapepam, IAI dan sebagainya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan

pertimbangan bagi penyusunan standar akuntansi lingkungan dan sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kualitas standar dan peraturan yang sudah ada.

5. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi manajemen karena penelitian ini meneliti *corporate governance* terhadap variabel dependen kualitas pengungkapan lingkungan dalam laporan keuangan tahunan maupun dalam laporan pengungkapan lingkungan tersendiri (*sustainability report*).
6. Memberikan pemahaman mendalam mengenai pengaruh media, dewan komisaris, dan investor institusional terhadap kualitas *environmental disclosure* melalui model yang komprehensif dan teruji secara empiris sesuai kondisi yang berlaku di Indonesia.
7. Bagi pihak lain, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan bahan pertimbangan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I :PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II :TELAAH PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori yang melandasi dilakukannya penelitian ini dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis. Dalam bab ini

dijelaskan pula kerangka pemikiran teoritis dan pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III :METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang dioperasionalkan dalam penelitian. Uraian tersebut meliputi definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, identifikasi variabel, dan metode analisis data.

BAB IV :ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini diuraikan deksripsi objek penelitian, analisis kuantitatif, interpretasi hasil serta dijelaskan pula argumentasi yang sesuai dengan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian serta keterbatasan penelitian. Untuk mengatasi keterbatasan penelitian tersebut, disertakan saran untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai : (i) Teori legitimasi yang menjadi landasan teori penelitian ini, dan konsep-konsep mengenai kualitas *environmental disclosure*, serta teori agensi dan konsep-konsep karakteristik *corporate governance* serta penelitian sejenis yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya (ii) kerangka penelitian, dan (iii) pengembangan hipotesis yang akan diuraikan dalam bab ini.

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berdasar pada teori legitimasi dan teori agensi. Teori legitimasi menunjukkan adanya kontrak sosial perusahaan dengan masyarakat untuk meningkatkan legitimasi perusahaan. Teori agensi menyatakan perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Salah satu cara untuk mengurangi konflik keagenan tersebut adalah dengan *good corporate covernance*.

2.1.1 Teori Legitimasi

Tuntutan *stakeholder* terhadap transparansi dan akuntabilitas perusahaan semakin meningkat khususnya untuk pengungkapan sosial dan lingkungan (Rupley, *et al.*, 2012). Berbagai tindakan oleh perusahaan semakin ditujukan untuk memberikan informasi ke *stakeholder*. Tindakan ini sesuai dengan teori legitimasi. Teori legitimasi menjelaskan kontrak sosial organisasi dengan masyarakat, kelangsungan hidup perusahaan akan terancam jika masyarakat merasa suatu perusahaan telah melanggar kontrak sosialnya.

Yang melandasi teori legitimasi adalah “kontrak sosial” yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Shocker dan Sethi (1974) dalam Ghozali dan Chariri (2007) memberikan penjelasan tentang konsep kontrak sosial sebagai berikut:

Semua institusi sosial tidak terkecuali perusahaan beroperasi di masyarakat melalui kontrak sosial-baik eksplisit maupun implisit dimana kelangsungan hidup pertumbuhannya didasarkan pada :

1. Hasil akhir (*output*) yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas.
2. Distribusi manfaat ekonomi, sosial atau politik kepada kelompok sesuai dengan power yang dimiliki.

Teori legitimasi memfokuskan pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Dowling Pfeffer (1975) dalam Ghozali dan Chariri (2007) memberikan alasan logis tentang legitimasi organisasi, sebagai berikut :

Organisasi berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang melekat pada kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem sosial masyarakat dimana organisasi adalah bagian dari sistem tersebut. Selama kedua sistem nilai tersebut selaras, kita dapat melihat hal tersebut sebagai legitimasi perusahaan. Ketika ketidakselarasan aktual atau potensial terjadi diantara kedua sistem nilai tersebut, maka akan ada ancaman terhadap legitimasi perusahaan.

Legitimasi sebuah perusahaan dapat diperoleh melalui berbagai tindakan, termasuk mengkomunikasikan informasi perusahaan kepada *stakeholder*. Pengungkapan sosial dan lingkungan merupakan kebutuhan perusahaan untuk dapat mempertahankan keberadaannya di masyarakat. Menurut Lindblom (1994) dalam Deegan, *et al.* (2002) menyatakan bahwa :

Legitimasi bersifat dinamis dalam bahwa publik yang relevan secara berkelanjutan mengevaluasi *output*, metode, dan tujuan perusahaan sejalan harapan yang terus berkembang. *Legitimacy gap* akan berubah-ubah tanpa perubahan apapun dalam setiap tindakan perusahaan. Memang, sebagai harapan publik perubahan perusahaan harus relevan atau *legitimacy gap*

akan tumbuh sebagai peningkatan konflik dan penurunan dukungan positif dan pasif.

Perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai sosial masyarakat dinamakan "*legitimacy gap*" dan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kegiatan usahanya (Dowling dan Prefer, 1975 dikutip oleh Ghozali dan Chariri, 2007). Menurut Warticl dan Mahon (1994) dalam Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa *legitimacy gap* terjadi karena tiga alasan :

- a. Ada perubahan dalam kinerja perusahaan dan harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan tidak berubah.
- b. Kinerja perusahaan tidak berubah tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan telah berubah.
- c. Kinerja perusahaan dan harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan berubah ke arah yang berbeda, atau ke arah yang sama tetapi waktunya berbeda.

Keberadaan *legitimacy gap* dapat menjadi ancaman perusahaan. Oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya *legitimacy gap* perusahaan harus berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan nilai-nilai masyarakat. Perusahaan harus berusaha memonitor nilai-nilai perusahaan dan nilai-nilai sosial masyarakat dan mengidentifikasi kemungkinan munculnya *gap* tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007).

Teori legitimasi menjelaskan perspektif *stakeholder* dalam kerangka teori ekonomi politik. Karena pengaruh masyarakat luas dapat menentukan alokasi sumber keuangan dan sumber ekonomi lainnya, perusahaan cenderung menggunakan kinerja berbasis lingkungan dan pengungkapan informasi

lingkungan untuk membenarkan atau melegitimasi aktivitas perusahaan di mata masyarakat (Gahozali dan Chariri, 2007).

Berdasarkan teori legitimasi diatas menunjukkan bahwa perusahaan mencoba memastikan perusahaan tersebut berindak atau seminimal mungkin berusaha untuk bertindak dalam batasan-batasan norma yang dijalankan oleh masyarakat atau *stakeholder*. Pengungkapan yang dibuat oleh perusahaan menyesuaikan dengan harapan dari *stakeholder* atau perusahaan dapat merubah persepsi dan harapan *stakeholder* tersebut, sehigga dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata *stakeholder*.

Berbagai hal yang bisa menjadi pemicu naiknya pengungkapan lingkungan, semestinya menjadi prioritas strategi perusahaan. Mekanisme *governance*, memberikan kontrol terhadap manajemen, agar manajemen menjalankan kebijakan dari dewan komisaris ke *stakeholder*, sebagai contoh regulasi tentang pengungkapan lingkungan dari manajemen yang ditujukan kepada *stakeholder*. Tekanan *stakeholder* juga menjadi *pressure* untuk melegitimasi keberadaan perusahaan.

2.1.2 Kinerja Lingkungan

Kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang hijau (*green*) sesuai dengan harapan para *stakeholder*. Kinerja lingkungan merupakan salah satu investasi bagi perusahaan untuk meraih kesuksesan bisnis. Jika kinerja lingkungan perusahaan baik maka opini publik terhadap perusahaan tersebut akan meningkat, begitu juga sebaliknya. Ketika opini publik terhadap perusahaan baik, maka posisi perusahaan di mata publik

semakin kuat karena mendapat legitimasi penuh dari masyarakat. Kinerja lingkungan adalah hasil yang dapat diukur melalui sistem manajemen lingkungan yang didasarkan pada kebijakan lingkungan, sasaran lingkungan dan target lingkungan (Purwanto, 2004).

Terdapat dua jenis ukuran kinerja lingkungan yaitu kinerja lingkungan kuantitatif dan kualitatif (Purwanto, 2004). Penjelasannya dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Kinerja lingkungan kuantitatif adalah kinerja yang hasilnya dapat diukur dari sistem manajemen lingkungan yang terkait kontrol aspek lingkungan fisiknya. Indikator kualitatif adalah ukuran yang didasarkan pada semantik, pandangan, persepsi seseorang berdasarkan pengamatan dan penilaiannya terhadap sesuatu. Kuantitatif adalah ukuran yang didasarkan pada data empiris dan hasilnya numerik yang menunjukkan karakteristik kinerja dalam bentuk fisik, keuangan dan bentuk lain, misalnya batas baku mutu limbah.
- b. Kinerja lingkungan kualitatif adalah kinerja yang hasilnya dapat diukur dari hal-hal yang terkait dengan ukuran aset non fisik seperti prosedur, proses inovasi, motivasi, dan semangat kerja yang dialami pelaku kegiatan dalam mewujudkan kebijakan lingkungan organisasi, sasaran dan target.

Menurut *Global Environmental Management Initiatives (GEMI)* tahun 1998 terdapat dua golongan indikator kinerja lingkungan yaitu *lagging* dan *leading*. Berikut penjelasan mengenai *lagging* dan *leading* :

- a. Indikator *lagging* yaitu ukuran kinerja *end process*, mengukur output hasil proses seperti jumlah limbah yang dikeluarkan.
- b. Indikator *leading* yaitu ukuran kinerja *in process*, mengukur implementasi prosedur yang dilakukan atau mengukur faktor apa yang diharapkan membawa perubahan bagi kinerja lingkungan.

2.1.3 Kualitas *Environmental Disclosure*

Kualitas *environmental disclosure* dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Rupley, *et al.* (2012). Kualitas *environmental disclosure* diklasifikasikan menjadi 4 (empat) tingkat strategi lingkungan berdasarkan literature manajemen lingkungan (Roome, 1992; Hart, 1995; Henriques dan Sadorsky, 1999). Keempat strategi lingkungan tersebut adalah *compliance*, *pollution prevention*, *product stewardship*, dan *sustainable development*. Perpindahan dari tingkat *compliance* ke tingkat *sustainable development* menunjukkan adanya peningkatan yang terintegrasi secara menyeluruh mengenai pengelolaan lingkungan ke dalam proses organisasi, strategi, dan budaya.

Roome (1992) dalam Henriques dan Sadorsky (1999) mengidentifikasi 5 (lima) strategi manajemen lingkungan yaitu *non-compliance*, *compliance*, *compliance plus*, *commercial and environmental excellence*, dan *leading edge*. *Non-compliance* terjadi ketika perusahaan mengalami keterbatasan biaya dan tidak dapat memberikan perubahan pada standar lingkungan. *Compliance* adalah posisi reaktif dengan di dorong oleh regulasi. Perusahaan mempraktikkan *compliance* tidak hanya digunakan untuk strategi lingkungan tetapi juga demi keuntungan kompetitif perusahaan (*competitive advantage*). Strategi *compliance*

plus adalah posisi proaktif pada manajemen lingkungan. *Commercial and environmental excellence* dan *leading edge* menunjukkan manajemen lingkungan sebagai manajemen yang baik dan berusaha menjadi pemimpin mengenai strategi lingkungan di industrinya.

Menurut Hart (1995) *natural-resource-based view : conceptual framework* merupakan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan sekitar. Berdasarkan conceptual framework tersebut terdapat 3 (tiga) strategi lingkungan, yaitu : *pollution prevention*, *product stewardship*, dan *sustainable development*. Berikut ringkasan mengenai *driving force*, *key resources*, dan *competitive advantage* dari ketiga strategi tersebut.

Tabel 2.1
A Natural-Resource-Based View : Conceptual Framework

Strategi Lingkungan	<i>Enviromental Driving Force</i>	<i>Key Resource</i>	<i>Competitive Advantage</i>
<i>Pollution Prevention</i>	Memperkecil emisi, limbah cair, dan limbah padat	Perbaikan yang berkesinambungan (<i>continuous improvement</i>)	Biaya yang lebih rendah (<i>lower cost</i>)
<i>Product Stewardship</i>	Memperkecil biaya dengan daur ulang produk	Pengintegrasian <i>stakeholder</i> (<i>stakeholder integration</i>)	Mendahului persaingan (<i>preempt competitors</i>)
<i>Sustainable Development</i>	Memperkecil kerugian lingkungan dari pertumbuhan dan pengembangan perusahaan	Kesamaan visi (<i>shared vision</i>)	Posisi masa depan (<i>future position</i>)

Sumber : Hart, 1995

Menurut Cirncross (1991) dikutip oleh Hart (1995) *pollution prevention* dapat dicapai melalui dua cara utama, artinya :

- a. *Control*: emisi dan limbah yang terjadi disimpan, dirawat, dan dibuang menggunakan peralatan pengendalian polusi.
- b. *Prevention*: emisi dan limbah dikurangi, diubah, atau dicegah melalui pekerjaan rumah tangga, substitusi bahan, daur ulang atau inovasi proses yang lebih baik.

Melalui *pollution prevention* perusahaan dapat meminimalkan biaya yang signifikan, menghasilkan keuntungan biasanya yang relatif dibandingkan dengan pesaing. *Pollution prevention* tidak hanya biaya pemasangan dan operasi dari peralatan pengendalian polusi, tetapi *pollution prevention* meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Limbah yang sedikit berarti pemanfaat yang lebih baik dari *input*, menghasilkan biaya yang lebih rendah untuk bahan baku dan pembuangan limbah (Young, 1991 dalam Hart, 1995). *Pollution prevention* juga mengurangi siklus waktu dengan menyederhanakan atau membuang tahapan yang tidak penting dalam operasi produksi. Selain itu *pollution prevention*, memberikan potensi untuk mengurangi emisi di bawah tingkat yang diperlukan, mengurangi kewajiban perusahaan dan biaya hutang (Rooney, 1993 dalam Hart, 1995). Dengan demikian, strategi *pollution prevention* harus memfasilitasi biaya yang lebih rendah, yang pada akhirnya akan menghasilkan peningkatan arus kas dan profitabilitas bagi perusahaan.

Jika *pollution prevention* berfokus pada pengembangan kapabilitas baru dalam produksi dan operasi, sedangkan *product stewardship* berfokus pada integrasi lingkungan dari perspektif stakeholder dalam desain produk dan proses pengembangan perusahaan (Hart, 1995). Menurut Robert (1995) dikutip oleh Hart

(1995) ciri-ciri strategi lingkungan *product stewardship* adalah biaya yang rendah dari siklus hidup lingkungan. Dapat dilakukan dengan cara berikut :

- a. Memperkecil penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.
- b. Menghindari menggunakan bahan yang berbahaya (*toxic material*)
- c. Menggunakan sumber daya yang dapat diperbaharui dalam proses produksi.
- d. Produk yang digunakan memiliki dampak terhadap lingkungan yang rendah dan mudah digunakan kembali atau di daur ulang sampai akhir masa ekonomisnya.

Menurut Hart (1995) mengimplementasikan strategi lingkungan *product stewardship* perusahaan dapat :

- a. Terhindar dari dampak lingkungan yang berbahaya.
- b. Mendesain ulang sistem produk yang ada untuk mengurangi kewajiban.
- c. Mengembangkan produk baru dengan biaya siklus hidup yang lebih rendah.

Strategi lingkungan yang paling baik adalah *sustainable development*. Jika perusahaan telah mencapai strategi *sustainable development*, maka fokus perusahaan terhadap lingkungan telah mencapai tahap yang berkelanjutan. Mengurangi emisi dan limbah adalah fokus pada strategi *pollution prevention*, strategi *product stewardship* fokus pada integrasi *stakeholder*, sedangkan strategi *sustainable development* dilakukan untuk menghubungkan antara lingkungan,

bisnis dan kegiatan ekonomi perusahaan (Hart, 1995). Bagi perusahaan, menerapkan strategi *sustainable development* berarti mengimplementasikan investasi yang substansial dan komitmen jangka panjang pada perkembangan pasar. Jika perusahaan mencapai tahap strategi *sustainable development*, maka perusahaan memiliki investasi lingkungan yang menguntungkan bagi perusahaan karena mengangkat citra perusahaan di mata *stakeholder*.

2.1.4 *Environmental Disclosure Index Scorecard*

Environmental disclosure index scorecard dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Rupley, *et al.* (2012). Untuk mengukur kualitas *environmental disclosure* menggunakan *environmental disclosure index scorecard*, dapat dilihat pada lampiran H. Indikator-indikator pengukuran berdasarkan pada kerangka *global reporting initiative* (GRI).

Standar mengenai lingkungan yang dibuat *global reporting initiative* (GRI) dinamakan *the sustainability reporting guidelines*. Tujuan GRI membuat standar tersebut adalah membantu para investor, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat umum untuk memahami lebih jelas mengenai proses peningkatan dalam pencapaian keberlanjutan (*sustainability*) dari kinerja lingkungan perusahaan. GRI menetapkan pedoman isi dasar yang harus muncul dalam sebuah laporan keberlanjutan:

- a. Strategi dan profil: Pengungkapan yang menentukan konteks keseluruhan dalam memahami kinerja organisasi, seperti strategi, profil dan tata kelola.

- b. Pendekatan manajemen: pengungkapan yang mencakup bagaimana sebuah organisasi mengarahkan seperangkat topik dalam menyediakan konteks untuk memahami kinerja.
- c. Indikator kinerja: indikator yang menghasilkan perbandingan informasi mengenai kinerja organisasi dalam hal ekonomi, lingkungan, dan sosial. Organisasi didorong untuk mengikuti struktur ini dalam mengkompilasi laporan.

Indikator yang dibuat oleh GRI relatif bersifat umum dan tidak mengidentifikasi pengukuran secara spesifik yang menggambarkan dampak lingkungan dari proses bisnis. Indeks dalam penelitian ini dikembangkan untuk menggambarkan dampak lingkungan yang lebih operasional. Dengan cara mengkombinasikan antara indikator *global reporting initiative* (GRI) dengan motif strategi pengungkapan lingkungan (Rupley, *et al.*, 2012). Indeks ini digunakan dan dijelaskan lebih lengkap pada Marshall, *et al.* (2007) dan Plumlee, *et al.* (2009) dan hampir mirip dengan indeks yang digunakan oleh Clarkson, *et al.* (2008).

Environmental disclosure index scorecard meliputi berbagai karakteristik dari setiap indikator untuk meningkatkan kemampuan indeks dalam menggambarkan kualitas pengungkapan lingkungan. Klasifikasi karakteristik indikator berdasarkan pada implikasi strategi lingkungan. Strategi lingkungan terdiri dari 4 (empat) strategi yaitu *compliance*, *pollution prevention*, *product stewardship*, dan *sustainable development*. Selain keempat strategi tersebut,

penelitian ini juga mengukur jumlah total indikator untuk menjelaskan seluruh strategi lingkungan secara keseluruhan dalam empat tingkatan.

Perpindahan dari tingkat *compliance* ke tingkat *sustainable development* menunjukkan adanya peningkatan yang terintegrasi secara menyeluruh mengenai pengelolaan lingkungan ke dalam proses organisasi, strategi, dan budaya. Menggunakan tingkat strategi dan pemahaman tentang penilaian kualitas pengungkapan lingkungan, skema pengkodean ini dikembangkan dan diuji (Rupley, *et al.*, 2012). Sebagai contoh, pengungkapan konsumsi energi termasuk pengungkapan total konsumsi energi (*tingkat compliance*), pengungkapan per-unit energi konsumsi (*tingkat pollution prevention*), dan pengungkapan konsumsi energi dari sumber daya yang dapat diperbaharui (*tingkat product stewardship*). Pengungkapan tingkat *sustainable development* pencapaian perusahaan pada tahap *green balance score card*.

2.1.5 Jenis-jenis Pengungkapan

Pengungkapan mengandung arti bahwa memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Jenis pengungkapan terbagi menjadi dua yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) (Ghozali dan Chariri, 2007).

Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) adalah pengungkapan yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku. Luas pengungkapan wajib tidak sama antar negara. Salah satu pengungkapan wajib di Indonesia diatur oleh Bapepam

dalam Peraturan No. X.K.6 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten dan perusahaan publik.

Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) yaitu penyampaian informasi yang diberikan secara sukarela oleh perusahaan diluar pengungkapan wajib. Salah satu cara meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah melalui pengungkapan sukarela secara lebih luas untuk membantu *stakeholder* dalam memahami strategi bisnis perusahaan. Pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh satu perusahaan berbeda dengan perusahaan lainnya. Hal ini dikarenakan peraturan yang tidak mewajibkannya pengungkapan sehingga perusahaan bebas memilih jenis informasi yang akan diungkapkan yang dipandang relevan dalam membantu pengambilan keputusan.

Di Indonesia, persyaratan untuk mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dalam UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 pasal 66 ayat (2) poin c yang menyebut bahwa laporan tahunan yang dibuat oleh perusahaan sekurang-kurangnya harus memuat laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Peraturan no. X.K.6 keputusan no. kep-134/ BL/ 2006 menyebut bahwa dalam laporan tahunan wajib memuat uraian mengenai aktivitas yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Namun demikian, dalam kedua peraturan tersebut tidak disebutkan persyaratan tentang bentuk, format, maupun isi dalam laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dapat disimpulkan bahwa di Indonesia pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan bersifat

wajib (*mandatory disclosure*) akan tetapi bentuk, format, maupun isi laporan bersifat sukarela .

2.1.6 *Environmental Media*

Brown dan Deegan (1998) dalam Deegan, *et al.* (2002) menjelaskan bahwa teori *media agenda setting* menyatakan adanya hubungan antara tekanan relatif yang diberikan media terhadap berbagai topik dan berbagai tingkatan topik ini memiliki arti penting bagi masyarakat umum. Peningkatan perhatian media diyakini menyebabkan peningkatan kepedulian masyarakat untuk isu tertentu. Media tidak terlihat seperti cermin bagi masyarakat publik, namun lebih membentuk masyarakat, dalam merubah opini publik.

McCombs, *et al.* (1995) dikutip oleh Deegan, *et al.* (2002) menekankan bahwa kesadaran masyarakat adalah langkah pertama dalam pembentukan opini publik dan media dengan jelas membentuk kesadaran masyarakat. Jumlah perhatian media yang ditujukan pada kerusakan lingkungan sangat mempengaruhi tingkat opini publik (Ader, 1993 dalam Deegan, *et al.*, 2002). Masyarakat publik membutuhkan media untuk menginformasikan bagaimana pentingnya sebuah isu lingkungan.

Liputan media diawali munculnya pentingnya masalah dalam pendapat masyarakat untuk isu-isu negatif, sedangkan untuk liputan media isu positif dan penting bagi masyarakat tampaknya semakin meningkat secara bersama-sama (Deegan, *et al.*, 2002). Brosius dan Kepplinger (1990) dalam Deegan, *et al.*, (2002) menemukan bahwa intensitas liputan media dengan liputan media tertentu

akan berdampak pada masyarakat publik, meskipun belum jelas apa yang disyaratkan oleh liputan media tersebut, sebelum teori *media agenda setting* dibuat. Cara dimana media meliput masalah juga dapat mempengaruhi terhadap sikap masyarakat publik. Hasil penelitian Dearing dan Rogers (1996) dalam Deegan, *et al.* (2002) menunjukkan bahwa isu-isu negatif dianggap masyarakat sebagai perhatian yang penting. Hal ini menunjukkan bahwa liputan media negatif memiliki dampak pada masyarakat publik yang lebih besar dibandingkan dengan isu positif. Keberadaan isu negatif tersebut menurunkan legitimasi perusahaan di mata masyarakat publik.

Penelitian Brown dan Deegan (1998) dikutip oleh Deegan, *et al.* (2002) melakukan uji terhadap teori legitimasi dengan mengadopsi liputan media sebagai proksi untuk fokus terhadap masyarakat publik. Penelitian ini mendukung teori legitimasi yang menguji liputan media terhadap *environmental disclosure*. Pada beberapa industri strategi manajemen mengenai *environmental disclosure* berpengaruh terhadap liputan media, tetapi tidak pada tingkatan liputan media seperti liputan positif dan negatif.

Teori legitimasi menyatakan bahwa legitimasi sebuah perusahaan dapat diperoleh melalui berbagai tindakan, termasuk mengkomunikasikan informasi perusahaan kepada *stakeholder* yang relevan (Ashforth dan Gibbs, 1990 dikutip oleh Rupley, *et al.*, 2012). Legitimasi dapat dilihat sebagai interaksi antara perusahaan dan *stakeholder*, dimana perusahaan mencoba untuk mengurangi risiko dan membangun stabilitas jangka panjang dengan memenuhi harapan *stakeholder*. Bansal dan Clelland (2004) menemukan bahwa perusahaan dengan

legitimasi lingkungan yang rendah lebih bertindak proaktif untuk mengkomunikasikan informasi melalui media. Informasi liputan media akan memberikan dampak meningkatkan legitimasi perusahaan. de Villiers dan van Staden (2011) menemukan bahwa perusahaan akan mengungkapkan informasi lingkungan lebih detail di situs web perusahaan ketika menghadapi krisis lingkungan dan akan lebih detail dalam laporan tahunan perusahaan ketika memiliki reputasi lingkungan yang buruk. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan akan selalu menjaga reputasi perusahaan agar mendapat legitimasi secara penuh dari para *stakeholder*.

Dapat disimpulkan bahwa liputan media berdampak pada masyarakat publik pada isu-isu tertentu dan media dapat membentuk kesadaran masyarakat publik. *Environmental disclosure* merupakan bentuk perhatian perusahaan terhadap lingkungannya agar mendapat legitimasi dari masyarakat atau *stakeholder*.

2.1.7 Teori agensi

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih pihak (prinsipal) melibatkan pihak lain (agen) untuk melakukan beberapa layanan atas nama prinsipal. Prinsipal yang dimaksud adalah pemegang saham (investor) sedangkan yang dimaksud dengan agen adalah manajemen perusahaan.

Adanya hubungan kontrak kedua belah pihak maka terjadinya manipulasi untuk meningkatkan utilitas masing-masing sangat mungkin terjadi (Jensen dan

Meckling, 1976). Agen berkewajiban memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham (prinsipal) tetapi di sisi lain manajer juga bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraannya. Hal ini yang akan memicu terjadi konflik kepentingan antara agen dan prinsipal.

Teori agensi menunjukkan bahwa manajemen, menghindari dari pengawasan mekanisme *corporate governance*, memaksimalkan keuntungan manajemen dan sering merugikan perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Mekanisme *corporate governance* menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan atas kemampuan manajemen menumbangkan kepentingan *stakeholder* demi keuntungan mereka sendiri semaksimal mungkin, mulai dari peraturan untuk dewan direksi kepada *stakeholder*.

Salah satu cara yang digunakan untuk memonitor masalah agensi dan mengurangi oppurtunistik manajer adalah dengan menggunakan tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Nasution dan Setiawan (2007) menyatakan *corporate governance* merupakan salah satu konsep yang digunakan untuk memonitor kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan kerangka peraturan. Perusahaan yang melaksanakan *good corporate governance* sudah seharusnya melaksanakan aktivitas CSR sebagai wujud kepedulian perusahaan pada lingkungan sosial (Rustiarini, 2010).

Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia menyatakan salah satu tujuan pelaksanaan *corporate governance* adalah mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan

kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Tanggung jawab sosial mengharuskan perusahaan bertanggung jawab kepada multilevel *stakeholder* untuk melaporkan keberlanjutan perusahaan secara sukarela (Sun *et al.* 2009).

Pengungkapan kinerja lingkungan sebagai salah satu tanggung jawab sosial perusahaan merupakan cara untuk mengalihkan perhatian pemegang saham dari isu lainnya. Karakteristik struktur *corporate governance* seperti proporsi komisaris independen, jumlah dewan komisaris, keberagaman gender, *multiple-directorship*, dan investor institusional.

2.1.8 Corporate Governance

2.1.8.1 Definisi Corporate Governance

Tujuan *corporate governance* adalah untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik dan member nilai tambah pada *stakeholder*. *Corporate governance* diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan (KNKG, 2006).

Definisi tentang corporate governance menurut Cadbury Committee dalam Forum Corporate Governance Indonesia adalah:

seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang

berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Corporate governance merupakan konsep yang didasari pada teori keagenan, yang memberikan keyakinan pada investor bahwa agen akan bekerja untuk kepentingan mereka (Restuningdiah, 2007). Rezaee (2007) mendefinisikan *corporate governance* sebagai:

“...is a process effected by legal, regulatory, contractual, and market-based mechanisms and best practices to create substantial shareholders value while protecting the interests of other shareholders.”

[... merupakan proses yang diakibatkan karena mekanisme yang legal, diatur, bersifat kontraktual, dan berbasis pasar serta praktik terbaik untuk menciptakan nilai yang substansial bagi para pemegang saham dan melindungi kepentingan pemegang saham lain].”

Dalam perspektif ekonomi modern dinyatakan bahwa *corporate governance* merupakan suatu jaringan hubungan antara sekelompok luas *stakeholder*, tidak hanya *shareholder*. Definisi *corporate governance* yang dijabarkan oleh Solomon (2007), yaitu:

“...the system of check and balances, both internal and eksternal to companies, which ensure that companies discharge their accountability to all their stakeholders and act in social responsible way in all areas of their business activity.”

[... sistem pengecekan dan penyelarasan aspek internal dan eksternal perusahaan, yang memastikan bahwa perusahaan melaksanakan akuntabilitas mereka kepada seluruh pemangku kepentingan dan bertindak dengan cara-cara yang bertanggungjawab sosial dalam seluruh aktivitas bisnisnya].”

Tata kelola perusahaan yang baik adalah yang mewujudkan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi masyarakat dan para *stakeholder*.

2.1.8.2 Asas *Corporate Governance*

Menurut KNKG (2006) dalam pedoman umum *good corporate governance* Indonesia terdapat 5 (lima) asas *good corporate governance*, yaitu:

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, maka perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara mudah diakses dan dipahami oleh *stakeholder*

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya sehingga perusahaan harus dikelola dengan benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan *stakeholder*. Akuntabilitas merupakan persyaratan yang harus dilakukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan yang memadai.

4. Independensi (*Independency*)

Dalam melaksanakan asas *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola dengan independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham pemangku kepentingan lainnya berdasarkan kewajaran dan kesetaraan.

2.1.9 Karakteristik Struktur *Corporate Governance*

Efisiensi dan efektivitas *corporate governance* sebagai suatu sistem pengelolaan perusahaan untuk mengurangi terjadinya konflik keagenan dalam perusahaan. *Corporate governance* dipengaruhi oleh beberapa karakteristik seperti:

2.1.9.1 Dewan Komisaris

Menurut UU Perseroan Terbatas Pasal 97 menyatakan bahwa Komisaris bertugas untuk mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberi nasihat terhadap direksi. Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan. Egon Zehnder International (2000) dalam Pedoman *good corporate governance* Indonesia (FGCI) menyatakan dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dewan komisaris bertanggung jawab untuk meningkatkan daya saing atau efisiensi sehingga sebagai pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan.

Anggota dewan komisaris sebuah perusahaan diangkat dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) dari orang-orang yang patut dan layak bagi perusahaan. Mereka diangkat untuk periode tertentu dan apabila memungkinkan mereka bisa

diangkat kembali. Dewan komisaris tidak boleh ikut serta dalam mengambil keputusan operasional dan mempertanggung jawabkan tugasnya kepada RUPS (KNKG, 2006). Dewan komisaris bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen telah memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern (Mulyadi, 2002).

Selain itu, dewan komisaris dianggap gagal dalam mewakili kepentingan *stakeholder* lainnya selain kepentingan pemegang saham mayoritas. Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 pasal 92 menyatakan dewan komisaris terdiri atas 1 (satu) orang atau lebih dan bagi perseroan terbatas yang menghimpun dana dari masyarakat wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota dewan komisaris. Menurut Beasley (2001) dalam Sembiring (2006) ada tiga karakteristik dewan komisaris dalam melakukan pengawasan manajemen yaitu komposisi dewan komisaris, pemisahan antara pimpinan dewan komisaris dengan CEO dan ukuran dewan komisaris.

2.1.9.2 Komisaris Independen

Berdasarkan keputusan Bapepam No. 29/PM/2004 Komisaris Independen didefinisikan sebagai anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham mayoritas serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006) menyatakan komposisi atau jumlah komisaris independen tidak ditentukan dalam jumlah tertentu. Namun, jumlahnya harus dapat menjamin mekanisme pengawasan berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan komisaris independen di Indonesiatelah diatur oleh Bursa efek Indonesia melalui peraturan BEJ tanggal 20 Juli 2001. Melalui peraturan tersebut dijelaskan bahwa perusahaan publik yang terdaftar di Bursa harus mempunyai komisaris independen yang jumlahnya secara proposional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen minimal 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Kriteria mengenai komisaris independen menurut lampiran keputusan BEI No. Kep - 339/BEJ/07-2001 sebagai berikut :

1. Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali perusahaan tercatat yang bersangkutan.
2. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/atau komisaris lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan.
3. Komisaris Independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan.
4. Komisaris Independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

5. Komisaris Independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Komisaris independen diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan pemegang saham maupun kepentingan manajemen. Keberadaan komisaris independen ini diharapkan bisa bersikap netral, karena tidak ada pengaruh dari manajemen. Dengan demikian, semakin besar proporsi dewan komisaris independen, maka kemampuan dewan komisaris untuk mengambil keputusan dalam rangka melindungi seluruh *stakeholder* semakin objektif (Rupley. *et al.*,2012)

2.1.9.3 Keberagaman Gender

Carter et al (2003) meneliti bahwa keragaman gender meningkatkan efektifitas dan nilai *shareholder*. Web (2004) menemukan bahwa perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan keragaman gender yang lebih dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan tanggung jawab sosial. Tingkat keberagaman gender pada dewan komisaris mempengaruhi pengambilan keputusan dan aktivitas perusahaan (Adams dan Ferreira, 2004 dalam Rao, *et al.*, 2012).

Keberagaman gender memiliki dampak positif pada kinerja perusahaan di Australia (Bonn, 2004). Salah satu karakteristik yang diperdebatkan dari dewan komisaris adalah gender. Pentingnya keragaman gender dalam posisi dewan

komisaris telah diangkat dalam usulan terakhir untuk pembaruan *corporate governance* (Adams dan Ferreira, 2004 dikutip oleh Rao, *et al.*, 2011).

Huse dan Solberg (2006) dalam Rao, *et al.* (2011) menemukan bahwa perempuan lebih berkomitmen dan terlibat, lebih siap, lebih rajin, mengajukan pertanyaan dan akhirnya menciptakan suasana yang baik di dalam dewan komisaris. Demikian pula, Adams dan Ferreira (2004) dalam Rao, *et al.* (2011) menemukan bahwa lebih banyak perempuan dalam dewan komisaris meningkatkan proses pengambilan keputusan, meningkatkan efektivitas dewan dan bahwa perempuan memiliki kehadiran atau partisipasi yang lebih baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan secara signifikan memiliki pengaruh terhadap dewan komisaris.

2.1.9.4 Multiple-Directorship

Anggota dari dewan komisaris yang melakukan bekerja di perusahaan lain dan mendapatkan pengetahuan dan interaksi dari berbagai dewan komisaris lainnya dibandingkan dengan anggota dewan lain yang bekerja dalam satu perusahaan. Kondisi seperti itu yang disebut dengan *multiple-directorship*. Menurut Fama dan Jensen (1983) dalam Rupley, *et al.* (2012) menunjukkan bahwa direktur menunjukkan keahlian mereka dengan bekerja di berbagai perusahaan atau memiliki pekerjaan lain.

Anggota dewan yang bekerja di berbagai perusahaan atau memiliki pekerjaan lain cenderung memiliki reputasi sebagai anggota yang memiliki nilai tambah dari tipe anggota lain (Rupley, *et al.*, 2012). Namun, terkadang keuntungan

dari representasi dari dewan komisaris diukur oleh pengaruh dari *interlocking directorship*. Sebagai contoh Bizjak, *et al.* (2009) memberikan bukti bahwa *interlocking directorship* saling memberikan kontribusi terhadap penyebaran perilaku tertentu perusahaan seperti opsi saham *backdating*. Dalam pengungkapan lingkungan, perusahaan dengan anggota dewan yang bekerja di beberapa *multiple boards*, akan memiliki kualitas yang lebih tinggi akan *environmental disclosure* karena telah mendapatkan pembandingan dengan perusahaan lain (Rupley, *et al.*, 2012).

2.1.9.5 Investor Institusional (Kepemilikan Institusional)

Konsentrasi kepemilikan adalah aspek penting dari *corporate governance*. Pola kepemilikan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu perusahaan terkonsentrasi dan menyebar (Shan, 2009 dalam Rao, *et al.*, 2011). Kepemilikan institusional adalah satu dari kepemilikan terkonsentrasi dan diukur dengan presentase dari saham institusional dibandingkan dengan total saham.

Investor institusional, merupakan karakteristik perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana seperti investor yang bisa berupa perusahaan pensiun, perusahaan *leasing*, perbankan, perusahaan investasi dan perusahaan asuransi (Lakhal, 2005 dikutip oleh Rao, *et al.*, 2011). Dari setiap jenis perusahaan yang menaungi investor, memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda terhadap pengungkapan lingkungan. Hoskisson (2002) dan Tihanyi, *et al.*, (2003) menemukan bukti bahwa variasi investor institusional bervariasi dalam preferensinya untuk jenis pengungkapan yang diberikan oleh perusahaan.

Emerson, *et al.* (2005) menyatakan bahwa investor institusional yang bersifat jangka panjang membutuhkan pengungkapan potensi pertumbuhan lingkungan, perubahan iklim, kewajiban lingkungan dan ijin lingkungan untuk mengoperasikan perusahaan. Artinya investor institusional yang memiliki waktu penyimpanan jangka panjang lebih menyukai perusahaan *investee* yang memiliki pengungkapan lingkungan yang berkualitas. Sebagai contoh perusahaan dana pensiun, karakteristik operasi perusahaan ini, memiliki durasi pengelolaan simpanan masyarakat yang cukup lama, sehingga saat perusahaan dana pension menginginkan melakukan investasi, maka sebagai pilihan yang utama adalah perusahaan yang memiliki pengungkapan lingkungan yang lebih berkualitas (Rupley, *et al.*,2012).

Investor institusional sebagai pemegang saham mayoritas akan mengurangi efektivitas dewan komisaris maupun manajemen perusahaan. Investor yang memiliki saham besar akan mendominasi dan mempengaruhi keputusan manajemen sebagai imbalan atas saham yang ditanamkan di perusahaan (Lau *et al.*, 2009 dalam Rao *et al.*, 2011). Hal ini akan mengurangi aktivitas manajemen maupun dewan komisaris untuk bertindak secara independen dan terkadang akan membatasi keputusan manajemen (Lakhal, 2006 dikutip oleh Rao, *et al.*,2011).

2.1.10 Penelitian Terdahulu

Dalam sub-bab ini akan dijelaskan mengenai penelitian-penelitian terdahulu mengenai liputan media, *corporate governance*, dan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan peneliti-peneliti terdahulu.

Penelitian Deegan, *et al.* (2002) menggunakan liputan media positif dan liputan negatif sebagai variabel independen dan *environmental disclosure* sebagai variabel dependen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan liputan media positif berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*. Sedangkan liputan media negatif berpengaruh lebih besar dibandingkan dengan liputan media positif terhadap *environmental disclosure*.

Sembiring (2006) melakukan penelitian mengenai karakteristik perusahaan terhadap opengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profil, dan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap indeks tanggung jawab sosial, sedangkan profitabilitas dan *leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks tanggung jawab sosial.

de villiers dan van Staden (2011) membandingkan antara reputasi lingkungan perusahaan yang jelek dalam jangka panjang dan perusahaan yang mengalami krisis lingkungan dalam jangka pendek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan akan mengungkapkan pengungkapan lingkungan di *website* ketika mengalami krisis lingkungan dan perusahaan akan lebih mengungkapkan di laporan tahunan ketika perusahaan memiliki reputasi yang jelek tentang lingkungan.

Penelitian mengenai *corporate governance* terhadap *environmental disclosure* dilakukan oleh Rao, *et al.* (2011). Karakteristik *corporate governance* dalam penelitian ini sebagai variabel independen antara lain dewan komisaris

independen, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, dan proporsi dewan komisaris perempuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, dan proporsi dewan komisaris perempuan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*.

Rupley. *et al.* (2012) melakukan penelitian tentang liputan media dan struktur *corporate governance* terhadap kualitas *voluntary environmental disclosure*. Liputan media dan struktur *corporate governance* sebagai variabel independen, sedangkan kualitas *voluntary environmental disclosure* sebagai variabel dependen. Variabel liputan media terdiri dari keberadaan liputan media dan liputan media negatif. Variabel struktur *corporate governance* terdiri dari karakteristik dewan komisaris dan investor institusional. Variabel karakteristik dewan komisaris terdiri dari dewan komisaris independen, keberagaman gender, *multiple-directorship*, *CEO duality*, dan keberadaan komite tanggung jawab sosial perusahaan. Variabel investor institusional terdiri dari variabel kepemilikan institusi jangka panjang dan kepemilikan institusi jangka pendek. Secara keseluruhan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keberadaan liputan media, liputan media negatif, dewan komisaris independen, dan *multiple-directorship* berpengaruh positif terhadap kualitas *environmental disclosure*, sedangkan variabel lain tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kualitas *environmental disclosure*.

Penelitian Yesika (2013) meneliti tentang *corporate governance* dan karakteristik perusahaan terhadap kinerja lingkungan. Variabel *corporate*

governance terdiri dari dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan jumlah pertemuan komite audit, sedangkan variabel karakteristik perusahaan terdiri dari profitabilitas, *leverage* dan jenis industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen dan jenis industri berpengaruh positif sedangkan ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kinerja lingkungan. Penelitian-penelitian terdahulu secara ringkas disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

Peneliti dan Tahun	Metodologi	Variabel	Hasil
Craig Deegan, Michaela Rankin dan John Tobin (2002)	Regresi Berganda	Variabel dependen : <i>environmental disclosure</i> Variabel independen: liputan media positif, dan liputan media negatif	Liputan media positif berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure</i> Liputan media negatif berpengaruh lebih besar dibandingkan dengan liputan media positif terhadap <i>environmental disclosure</i> .
Eddy Rismanda Sembiring (2006)	Regresi OLS	Variabel dependen: Indeks tanggung jawab sosial Variabel independen: Ukuran perusahaan, profil, ukuran dewan komisaris, profitabilitas, <i>leverage</i> .	Ukuran perusahaan, profil, dan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap indeks tanggung jawab sosial, sedangkan profitabilitas dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap indeks tanggung jawab sosial.

Charl de villiers dan Chris J. van Staden (2011)	Regresi OLS	<p>Variabel dependen: Informasi lingkungan</p> <p>Variabel independen: reputasi perusahaan mengenai lingkungan yang jelek secara jangka panjang, krisis lingkungan dalam jangka pendek.</p>	Perusahaan akan menungkapkan pengungkapan lingkungan di <i>website</i> ketika mengalami krisis lingkungan dan perusahaan akan lebih mengungkapkan di laporan tahunan ketika perusahaan memiliki reputasi yang jelek tentang lingkungan.
Kathyayini Rao, Carol A. Tilt, dan Lauence H. Letser (2011)	Regresi OLS	<p>Variabel dependen: kualitas <i>voluntary environmental disclosure</i></p> <p>Variabel independen: dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, dan proporsi dewan komisaris perempuan.</p>	Ukuran dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, dan proporsi dewan komisaris perempuan berpengaruh positif terhadap kualitas <i>voluntary environmental disclosure</i> .
Kathleen Hertz Rupley, Darrell Brown, R. Scott Marshall (2012)	Regresi Berganda	<p>Variabel dependen: kualitas <i>environmental disclosure</i></p> <p>Variabel independen: Keberadaan liputan media, liputan media negatif, dewan komisaris independen, keberagaman gender, <i>multiple-directorship</i>, CEO <i>duality</i>, komite</p>	Keberadaan liputan media, liputan media negatif, dewan komisaris independen, dan <i>multiple-directorship</i> berpengaruh positif terhadap kualitas <i>environmental disclosure</i> .

		CSR, kepemilikan institusional jangka pendek dan kepemilikan institusional jangka panjang	
Nina Yesika (2013)	Regresi OLS	Variabel dependen: kinerja lingkungan Variabel independen: dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah pertemuan komite audit, profitabilitas, <i>leverage</i> dan jenis industri.	Komisaris independen dan jenis industri berpengaruh positif sedangkan ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kinerja lingkungan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Rupley, *et al.* (2012). Namun, penelitian ini berbeda dalam hal penentuan kriteria dewan komisaris, kriteria investor institusional, dan objek serta sampel penelitian.

2.2 Kerangka Pemikiran

Hubungan antar variabel serta alasan penyajian gambar akan dijelaskan mengenai sub-bab kerangka pemikiran ini.

Environmental disclosure mulai berkembang sejalan dengan perkembangan *corporate social responsibility* oleh perusahaan-perusahaan publik. Perusahaan semakin memberikan perhatiannya terhadap lingkungan, hal ini sesuai dengan teori legitimasi, dimana perusahaan berharap mendapatkan pengakuan serta memenuhi kontrak sosial dari masyarakat.

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai praktik perusahaan terhadap lingkungan terutama pada pengungkapan lingkungan yang menjadi tanggung jawab sosial perusahaan. Sesuai dengan penelitian Rupley, *et al.* (2012) yang menjadi acuan utama dalam penelitian ini kualitas *environmental disclosure* ini dipengaruhi oleh karakteristik *corporate governance* yang mewakili *shareholder* dan dipengaruhi oleh masyarakat di sekitarnya sebagai *non-shareholder*. Karakteristik *corporate governance* dijabarkan menjadi 2 (dua) yaitu karakteristik dewan komisaris dan investor institusional. Dewan komisaris sebagai wakil dari *shareholder* untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan dan investor institusional merupakan kepemilikan saham oleh intitusi. Dapat dikatakan bahwa investor institusional merupakan variabel yang menggambarkan *shareholder* yang mempunyai hubungan dengan manajemen perusahaan. Adanya mekanisme *corporate governance* tersebut akan mengurangi konflik keagenan antara agen dan prinsipal, karena kinerja agen akan diawasi oleh dewan komisaris, sehingga agen tersebut akan bekerja sesuai sistem pengendalian yang ada.

Liputan media yang digunakan dalam penelitian ini mewakili *non-shareholder* yaitu masyarakat dan *stakeholder* lainnya. Menurut teori legitimasi perusahaan membutuhkan kontrak sosial dari masyarakat untuk mendapatkan legitimasi penuh dari masyarakat publik. Kesadaran masyarakat adalah langkah pertama dalam pembentukan opini publik dan media dengan jelas membentuk kesadaran masyarakat (McCombs, *et al.*, 1995 dikutip oleh Deegan, *et al.* 2002) .

Liputan media akan merubah persepsi masyarakat publik terhadap perusahaan, sehingga dapat menyebabkan naik turunnya reputasi perusahaan.

Variabel kontrol dalam penelitian ini digunakan untuk mengontrol keadaan keuangan perusahaan dengan *return on asset*, ukuran perusahaan dengan log natural dari penjualan, sensitif polusi yang dihasilkan perusahaan, dan laporan pengungkapan yang terpisah dari laporan keuangan.

Media sebagai proksi dari *environmental media* yang mewakili *non-shareholder stakeholder* diukur dengan menggunakan dua model. Model 1 yaitu mengukur ada atau tidaknya liputan media tentang lingkungan pada tahun yang bersangkutan. Model 1 ini dilambangkan dengan MEDIA_EXIST. Model 2 diukur dengan membagi karakteristik media menjadi 3 sifat media yaitu positif media, negatif media, dan netral media. Masyarakat sebagai *non-shareholder stakeholder* secara tidak langsung untuk menilai kinerja lingkungan perusahaan menilai perusahaan dari isu-isu liputan media. Adanya liputan media diharapkan perusahaan mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

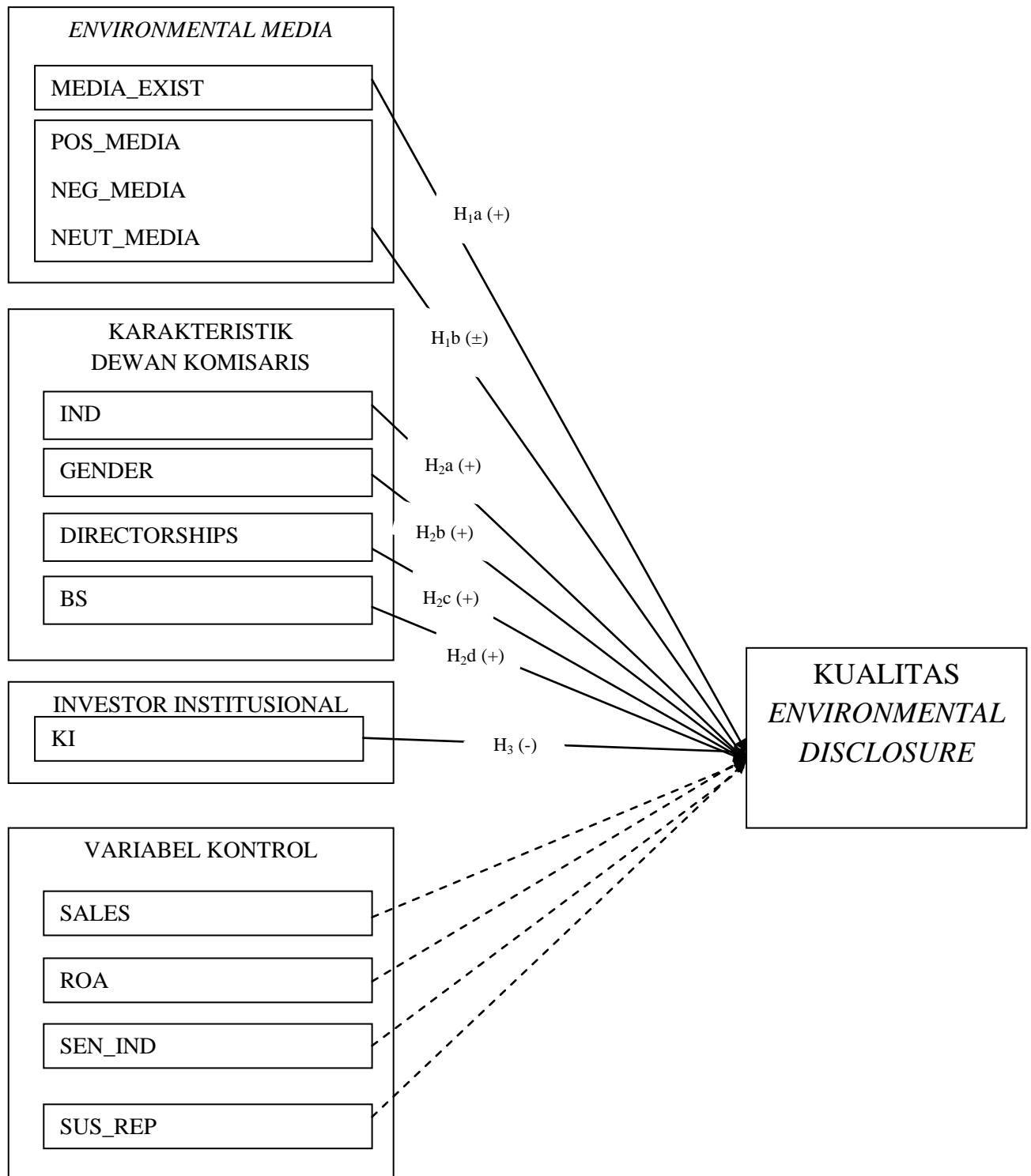
Dewan komisaris menunjukkan pengawasan yang dilakukan oleh *shareholder stakeholder* kepada manajemen. Dewan komisaris diproksikan menjadi 4 karakteristik yaitu komisaris independen, keragaman gender, dewan komisaris yang memiliki pekerjaan lain, dan jumlah dewan komisaris.

Investor institusional untuk melihat kepemilikan ekuitas yang dimiliki oleh suatu institusi baik yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung

dengan perusahaan. Investor institusional yang dimaksud adalah saham yang dimiliki oleh institusi keuangan, yang dilambangkan dengan KI.

Pengungkapan informasi mengenai kinerja perusahaan merupakan hal yang penting bagi *stakeholders*. Perusahaan yang mengungkapkan kinerja lingkungannya dengan baik akan mendapatkan legitimasi dari para *stakeholder*. Perusahaan dengan *corporate governance* yang baik cenderung mengungkapkan lingkungannya dengan baik dalam laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan. Pengungkapan ini dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder* sebagai pertimbangan pengambilan keputusan selain dari segi finansial. Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran



2.2 Hipotesis

Berdasarkan teori yang digunakan dan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, pada sub-bab ini akan dijelaskan mengenai hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian. Dalam sub-bab ini akan dibagi menjadi 3 sub-sub bab yaitu *environmental media*, karakteristik dewan komisaris, dan investor institusional. Berikut akan dijelaskan mengenai pengembangan hipotesis dalam penelitian ini.

2.3.1 *Enviromental Media*

Dalam sub-bab ini terdapat 2 hipotesis, dengan variabel independen yaitu keberadaan liputan media dan liputan media negatif.

1. **Pengaruh liputan media tentang lingkungan terhadap kualitas *environmental disclosure*.**

Teori legitimasi menyatakan bahwa legitimasi sebuah perusahaan dapat diperoleh melalui berbagai tindakan, termasuk melakukan komunikasi dengan berbagai *stakeholder* (Ashforth dan Gibbs, 1990 dikutip oleh Rupley, *et al.*, 2012). Legitimasi merupakan kontrak sosial perusahaan, dapat dilihat sebagai interaksi antara perusahaan dengan *stakeholder*, dimana perusahaan mencoba mengurangi risiko dan membangun stabilitas jangka panjang dengan memenuhi harapan dari *stakeholder*.

Keberadaan liputan media mengenai lingkungan menunjukkan bahwa *stakeholder* mempunyai pengetahuan tentang isu lingkungan dari perusahaan tersebut. Terutama pada *non-shareholder stakeholder* yang menilai baik-buruknya perusahaan bersumber pada isu-isu liputan media dibandingkan dari sisi finansial

perusahaan. Media akan membentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Publisitas liputan media tentang lingkungan akan meningkatkan legitimasi dari *stakeholder* terhadap perusahaan tersebut.

Penelitian Rupley, *et al.* (2012) menunjukkan adanya hubungan positif dari liputan media tentang lingkungan terhadap kualitas *environmental disclosure*. Penelitian Brosius dan Kepplinger (1990) dalam Deegan, *et al.* (2002) menunjukkan bahwa intensitas liputan media dengan isu tertentu berdampak pada pengungkapan sukareka perusahaan. Sejalan dengan hasil penelitian Deegan, *et al.* (2002) bahwa liputan media berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1a : Liputan media tentang lingkungan berpengaruh positif terhadap kualitas *environmental disclosure*.

2. Pengaruh liputan media negatif tentang lingkungan terhadap kualitas *environmental disclosure*.

Tuntutan *stakeholder* terhadap transparansi dan akuntabilitas perusahaan semakin meningkat khususnya untuk pengungkapan sosial dan lingkungan (Rupley, *et al.*, 2012). Berbagai tindakan oleh perusahaan semakin ditujukan untuk memberikan informasi ke *stakeholder*. Tindakan ini sesuai dengan teori legitimasi. Teori legitimasi menjelaskan kontrak sosial organisasi dengan masyarakat, kelangsungan hidup perusahaan akan terancam jika masyarakat

merasa organisasi telah melanggar kontrak sosialnya. Liputan media negatif membuat reputasi perusahaan menjadi jelek di mata masyarakat. Oleh karena itu, jika perusahaan memiliki liputan media negatif akan diimbangi dengan pengungkapan lingkungan yang lebih baik.

Penelitian Rupley, *et al.* (2012) dan Deegan, *et al.* (2002) menunjukkan adanya pengaruh antara liputan media yang negatif terhadap kualitas *environmental disclosure*. Penelitian Dearing dan Rogers (1996) dalam Deegan, *et al.* (2002) menunjukkan bahwa isu-isu negatif memiliki dampak pada masyarakat publik yang lebih besar dibandingkan dengan isu positif. Dalam menghadapi publisitas lingkungan yang negatif, perusahaan cenderung meningkatkan kualitas pengungkapan lingkungan dalam upaya untuk tampil lebih transparan dan membangun *image* baik dalam persepsi publik. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1b : Liputan media negatif tentang lingkungan berpengaruh positif terhadap kualitas *environmental disclosure*

2.3.2 Karakteristik Dewan Komisaris

Dalam sub-bab ini terdapat 4 hipotesis, dengan variabel independen yaitu dewan komisaris independen, keberagaman gender, *multiple-directorship*, dan ukuran dewan komisaris.

1. Pengaruh komisaris independen terhadap kualitas *environmental disclosure*.

Perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal merupakan masalah utama diantara keduanya sehingga diperlukan adanya pihak yang secara independen mengawasi kinerja manajemen agar tidak merugikan kepentingan pemegang saham. Komisaris independen merupakan pihak yang dapat berperan sebagai pengawas manajemen dalam melaksanakan sistem *corporate governance* (Fadhilah, 2013).

Tugas dari dewan komisaris pada umumnya adalah melakukan pengawasan pada pengelolaan perusahaan. Komisaris independen diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan pemegang saham maupun kepentingan manajemen. Keberadaan komisaris independen ini diharapkan bisa bersikap netral, karena tidak ada pengaruh dari manajemen. Dengan demikian, semakin besar proporsi dewan komisaris independen, maka kemampuan dewan komisaris untuk mengambil keputusan dalam rangka melindungi seluruh *stakeholder* semakin objektif

Penelitian Rupley, *et al.* (2012) menunjukkan hubungan yang positif antara independensi dewan komisaris dengan kualitas *voluntary environmental disclosure*. Penelitian Rao, *et al* (2011) juga menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif dari proporsi komisaris independen terhadap pengungkapan lingkungan. Semakin tinggi proporsi dewan komisaris, maka pengungkapan

lingkungan oleh perusahaan semakin besar. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2a : Komisaris indepeden berpengaruh positif terhadap kualitas *environmental disclosure*.

2. Pengaruh keragaman gender terhadap kualitas *environmental disclosure*.

Permasalahan antara agen dan prinsipal dapat di minimalisir dengan melakukan pengawasan terhadap manajemen. Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap manajemen. Keberagaman gender dalam dewan komisaris dapat meminimalisir terjadinya konflik keagenan disebabkan karena tingkat keberagaman gender berpengaruh terhadap aktivitas dan pengambilan keputusan dewan komisaris (Adams dan Ferreira, 2004 dalam Rao, *et al.*, 2011).

Huse dan Solberg (2006) dalam Rao, *et al.* (2011) menemukan bahwa perempuan lebih berkomitmen dan terlibat, lebih siap, lebih rajin, mengajukan pertanyaan dan akhirnya menciptakan suasana yang baik di dalam dewan komisaris. Demikian pula, Adams dan Ferreira (2004) dalam Rao, *et al.* (2011) menemukan bahwa lebih banyak perempuan dalam dewan komisaris meningkatkan proses pengambilan keputusan, meningkatkan efektivitas dewan dan bahwa perempuan memiliki kehadiran atau partisipasi yang lebih baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan secara signifikan memiliki pengaruh terhadap dewan komisaris. Jika perempuan berpengaruh terhadap dewan komisaris, maka akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan.

Dewan komisaris perempuan lebih banyak memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan baik finansial maupun non finansial. Penambahan dewan komisaris perempuan memiliki sinyal yang positif pada stakeholder (Huse dan Solberg, 2006 dalam Rao, *et al.*, 2011). Menurut Ibrahim dan Angelidis (1994) dikutip oleh Rao, *et al.*, (2011) menunjukkan bahwa dewan komisaris perempuan menunjukkan tanggung jawab yang lebih besar, dalam penelitiannya menemukan bahwa wanita lebih aktif dan kurang peduli dengan kinerja ekonomi.

Penelitian Rupley, *et al.*, (2012) dan Rao, *et al.*, (2011) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dari dewan komisaris perempuan terhadap pengungkapan lingkungan. Sejalan dengan Webb (2004) menemukan bahwa perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan keragaman gender yang lebih dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan tanggung jawab sosial. Dewan komisaris perempuan keterlibatan aktif, memiliki persiapan yang lebih baik, kemandirian dan kualitas yang unik lainnya, memungkinkan mereka untuk berkontribusi secara maksimal terhadap pengambilan keputusan seperti pengungkapan lingkungan (Rao, *et al.*, 2011). Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2b : Keragaman gender berpengaruh positif terhadap kualitas *environmental disclosure*.

3. Pengaruh *multiple directorships* terhadap kualitas *environmental disclosure*.

Anggota dari dewan komisaris yang melakukan bekerja di perusahaan lain dan mendapatkan pengetahuan dan interaksi dari berbagai dewan komisaris lainnya dibandingkan dengan anggota dewan lain yang bekerja dalam satu perusahaan. Kondisi seperti itu yang disebut dengan *multiple-directorship*. Menurut Fama dan Jensen (1983) dalam Rupley, *et al.* (2012) menunjukkan bahwa dewan komisaris menunjukkan keahlian mereka dengan bekerja di berbagai perusahaan atau memiliki pekerjaan lain.

Anggota dewan yang bekerja di berbagai perusahaan atau memiliki pekerjaan lain cenderung memiliki reputasi sebagai anggota yang memiliki nilai tambah dari tipe anggota lain (Rupley. *et al.*,2012). Dalam pengungkapan lingkungan, perusahaan dengan anggota dewan yang bekerja di beberapa *multiple boards*, akan memiliki kualitas yang lebih tinggi akan pengungkapan mengenai lingkungan karena telah mendapat pembandingan dengan perusahaan lain (Rupley, *et al.*, 2012).

Penelitian Rupley, *et al.* (2012) menunjukkan bahwa *multiple directorships* berpengaruh positif terhadap kualitas *voluntary environmental disclosure*. Memiliki dewan komisaris yang memiliki kualitas yang lebih baik akan mengurangi konflik keagenan karena dewan komisaris tersebut akan melakukan pengawasan terhadap manajemen yang terbaik demi kepentingan *stakeholder*. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2c : *Multiple directorships* berpengaruh positif terhadap kualitas *environmental disclosure*.

4. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kualitas *environmental disclosure*.

Teori agensi menyatakan bahwa prinsipal akan mengangkat agen untuk melayani prinsipal dan untuk memaksimalkan nilai prinsipal (pemegang saham). Dalam hal ini, *corporate governance* didesain untuk memenuhi kepentingan pemegang saham (investor). Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap manajemen, tidak boleh melibatkan diri dalam tugas-tugas manajemen dan tidak boleh mewakili perusahaan dalam transaksi-transaksi dengan pihak ketiga (FCGI, 2006).

Dewan komisaris memiliki peranan penting dalam mengawasi kinerja manajemen. Pengawasan oleh dewan komisaris akan mencegah pengendalian yang berlebihan oleh manajemen. Teori agensi menjelaskan bahwa ukuran dewan komisaris yang semakin besar akan memudahkan dilakukan pengendalian terhadap agen dan mencegah terjadinya penyimpangan. Sembiring (2006) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan pengawasan yang dilakukan akan semakin efektif.

Hasil penelitian Rao, et al.(2011) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berhubungan positif terhadap pengungkapan lingkungan. Artinya semakin besar jumlah dewan komisaris, maka pengungkapan lingkungan oleh perusahaan akan semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian Sembiring

(2006) dan de Villiers, *et al.* (2009) menemukan ada hubungan positif signifikan antara ukuran dewan dengan kinerja lingkungan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

H2d : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas *environmental disclosure*.

2.3.3 Investor Institusional

Dalam sub-bab ini akan dijelaskan 1 hipotesis mengenai investor institusional. Investor institusional yaitu kepemilikan saham yang dimiliki oleh kepemilikan saham keuangan.

1. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap kualitas *environmental disclosure*.

Dalam teori agensi dijelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara manajer sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Diperlukan pengawasan oleh prinsipal terhadap kinerja manajemen untuk memaksimalkan kepentingan prinsipal. Investor institusional merupakan salah satu jenis kepemilikan terkonsentrasi. Perusahaan yang memiliki kepemilikan terkonsentrasi akan lebih mudah mempengaruhi nilai perusahaan, termasuk nilai-nilai lingkungan (Halme dan Huse, 1997 dalam Rao, *et al.*, 2011). Investor institusional pada perusahaan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh manajemen agar sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan dapat mengurangi indenpendensi manajemen dalam mengambil keputusan.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa peningkatan permintaan pengungkapan informasi disebabkan adanya pemisahan dari kepemilikan dan pengendalian. Pemegang saham institusional akan meminta pengungkapan yang lebih banyak agar dapat mengakses informasi internal dengan mudah. Namun, pemegang saham menginginkan dapat dengan mudah mengakses informasi yang diinginkan, di lain pihak pemegang saham dapat menekan manajemen untuk mengungkapkan informasi yang minimum terhadap publik (Laidroo, 2009 dalam Rao, *et al.*, 2011). Perusahaan memiliki sedikit insentif untuk mengungkapkan laporan tambahan yang dibutuhkan oleh pemegang saham karena perusahaan tidak menarik modal dari luar untuk mengungkapkan informasi tambahan tersebut, termasuk pengungkapan lingkungan (Habib dan Jiang, 2009).

Penelitian Rao, *et al.* (2011) menunjukkan adanya pengaruh negatif dari kepemilikan institusional terhadap *environmental disclosure*. Hasil penelitian Rupley, *et al.* (2012) menunjukkan investor institusional berpengaruh negatif terhadap kualitas *voluntary environmental disclosure*. Investor institusional merupakan kepemilikan institusi oleh institusi keuangan seperti perusahaan perusahaan asuransi, lembaga penyimpan dana (bank dan lembaga simpan pinjam), lembaga dana pensiun, maupun perusahaan investasi. Investor institusional termasuk dana pensiun, *mutual fund*, bank, penasihat investasi, dan asuransi perusahaan yang merupakan akun kolektif yang terdaftar di saham perusahaan publik (Ingley dan van der Walt, 2004 dalam Rupley, *et al.*, 2012). Di negara berkembang seperti Indonesia, bentuk kepemilikan institusi keuangan masih terbatas karena tingkat risiko dan terbatasnya kapitalisasi pasar

(Hadiprajitno,2012). Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Kepemilikan institusional berhubungan negatif terhadap kualitas *environmental disclosure*

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana penelitian ini akan dilakukan. Oleh karena itu, akan dibahas mengenai definisi dan operasional variabel yang digunakan pada penelitian, populasi dan sampel data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel penelitian yaitu variabel Dependen, Variabel Independen, dan Variabel Kontrol.

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah kualitas pengungkapan lingkungan secara sukarela yang dinyatakan dalam kualitas *environmental disclosure* yang dilambangkan dengan ED. ED merupakan data yang diungkapkan oleh perusahaan berkaitan dengan aktivitas lingkungan perusahaan. Informasi mengenai lingkungan dapat di peroleh dari laporan tahunan (*annual report*) maupun laporan berkelanjutan (*sustainability report*).

Untuk mengukur kualitas ED digunakan indeks pengungkapan berdasarkan *environmental disclosure index scorecard* Rupley, *et al.* (2012) yang tersaji dalam lampiran A. Indeks ini digunakan dan dideskripsikan lebih lengkap dalam Marshall, *et al.* (2007) dan Plume, *et al.* (2009) dan indeks yang sejenis oleh Clarkson, *et al.* (2008).

Indeks pengungkapan meliputi karakteristik dari indikator untuk meningkatkan kemampuan dari penggambaran kualitas indeks. Dalam penelitian

ini, menggunakan beberapa indikator *Global Reporting Initiative (GRI)* tentang pengungkapan lingkungan yang di klasifikasikan berdasarkan implikasi strategik perusahaan dalam perilaku lingkungannya. Berdasarkan review dari literatur manajemen lingkungan, kualitas pengungkapan lingkungan dibagi menjadi 4 tingkatan kelompok strategi yaitu *compliance*, *pollution prevention*, *product stewardship*, dan *sustainable development*. Pengelompokan ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh kualitas pengungkapan lingkungan yang diungkapkan oleh perusahaan. Perubahan dari tingkat *compliance* ke tingkat *sustainable development* menyiratkan sebuah peningkatan dari pengelolaan lingkungan ke dalam proses organisasi, strategi, dan budaya. Indikator pengungkapan lingkungan dikembangkan dan diuji dengan menggunakan tingkat strategi tersebut yang terangkum dalam *environmental disclosure index scorecard* (lampiran H) untuk memahami kualitas penilaian pengungkapan lingkungan. Sebagai contoh, pengungkapan dari konsumsi energi termasuk dalam jumlah konsumsi energi (tingkat *compliance*), pengungkapan konsumsi per unit (tingkat *pollution prevention*), dan pengungkapan konsumsi energi dari sumber daya yang diperbaharui (tingkat *product stewardship*). Tingkat pengungkapan *sustainable development* dapat dilihat dari *green balance score card*. *Green balance score card* berdasar dari sisi internal, konsumen, dan finansial yang digunakan untuk mencegah ataupun mengurangi pencemaran lingkungan perusahaan.

DQ_COMP = Jumlah item *compliance* yang diungkapkan perusahaan

DQ_POLLPREV = Jumlah item *pollution prevention* yang diungkapkan perusahaan

- DQ_PROSTEW = Jumlah item *product stewardship* yang diungkapkan perusahaan
- DQ_SUSDEV = Jumlah item *sustainable development* yang diungkapkan perusahaan
- DQ_TOTAL = Jumlah seluruh item (*compliance, pollution prevention, product stewardship, dan sustainable development*) yang diungkapkan perusahaan

3.1.2 Variabel Independen

Dalam penelitian ini digunakan 3 proksi variabel independen yaitu *environmental media*, dewan komisaris dan investor institusional.

3.1.2.1 *Environmental Media*

Untuk mengukur *environmental legitimacy* digunakan media sebagai alat ukur berdasarkan pengembangan metode yang digunakan oleh Bansal dan Clelland (2004). Untuk proksi media ini, digunakan surat kabar yang dipublikasikan secara *online* untuk mengukur proksi media dalam proksi *environmental legitimacy*. Untuk mencari artikel media tentang pengungkapan dicari dengan menggunakan kata kunci “lingkungan”, “limbah” , “polusi”, “*green*”, “*sustainable*”, “GRI”, “B3”, “CSR” dan “perubahan iklim”.

Setiap identifikasi artikel diberi kode untuk memberikan dampak dari legitimasi lingkungan apakah positif, negatif, atau netral. Kode disimbolkan dalam 2 jenis. Dalam Model 1, eksistensi media dihubungkan dengan kualitas ED. Pengukuran eksistensi media menggunakan variabel MEDIA_EXIST, dimana

diberi nilai satu jika perusahaan menerima liputan media tentang lingkungan selama tahun berjalan, dan nol yang lainnya

Dalam Model 2 , diukur semua sifat dari media baik positif, negatif, atau netral dihubungkan dengan kualitas ED. Untuk mengukur proksi environmental media , digunakan Janis-Fadner *coefficient of imbalance* (Janis dan Fadner 1995; Bansal dan Clelland, 2004). Koefisien ini bernilai dari -1.0 sampai +1.0 dimana rasio yang lebih tinggi adalah artikel positif lebih banyak dari negatif yang bernilai mendekati +1.0 dan artikel rasio negatif lebih banyak dari rasio positif nilai mendekati -1,0. Koefisien Janis-Fadner diukur sebagai berikut :

$$\text{Koefisien Janis- Fadner} = \frac{e^2 - ec}{t^2} \text{ if } e > c$$

$$\frac{ec - c^2}{t^2} \text{ if } c > e$$

$$0 \text{ if } e = c$$

dimana e adalah menggambarkan jumlah artikel lingkungan yang positif, c adalah jumlah artikel lingkungan yang negatif, dan t adalah sama dengan e +c

Variabel MEDIA_EXIST dalam Model 1 digantikan dengan Model 2 dengan tiga variabel yang diukur untuk media. Tiga variabel yaitu positif media, negatif media, dan netral media. Ketiga kategori media digunakan menjadi dasar pengukuran. POS_MEDIA adalah suatu perusahaan yang memiliki nilai positif dari koefisien Janis-Fadner, nol yang lainnya. NEG_MEDIA adalah suatu perusahaan yang memiliki nilai negatif dari koefisien Janis-Fadner, nol yang lainnya. NEUT_MEDIA adalah suatu perusahaan yang memiliki nilai netral dari koefisien Janis-Fadner, nol yang lainnya.

3.1.2.2 Karakteristik Dewan Komisaris

Proksi dewan komisaris diukur dengan menggunakan 4 variabel indikator yaitu independensi dari dewan komisaris, variasi gender, *multiple-directorship*, dan ukuran dewan komisaris (*board size*).

Independensi dari dewan komisaris disimbolkan dengan “IND” adalah jumlah dewan komisaris dengan tidak memiliki hubungan dengan perusahaan.

IND = Jumlah anggota dewan komisaris independen yang dimiliki perusahaan

Variasi gender dilambangkan dengan “GENDER” adalah jumlah dari dewan komisaris perempuan.

GENDER = Jumlah anggota dewan komisaris perempuan yang dimiliki perusahaan

Variabel *multiple-directorship* dilambangkan dengan “DIRECTORSHIP” adalah jumlah dari anggota dewan komisaris yang memiliki lebih dari satu pekerjaan. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah pekerjaan lain, selain sebagai dewan komisaris di perusahaan tersebut.

DIRECTORSHIP = Jumlah anggota dewan komisaris yang memiliki pekerjaan lebih dari satu

Variabel *Board Size* dilambangkan dengan “BS” adalah jumlah anggota dewan komisaris yang duduk di perusahaan

BS = Jumlah anggota dewan komisaris yang duduk di perusahaan

3.1.2.3 Investor Institusional

Investor institusional diukur dengan satu pengukuran yaitu dengan menggunakan presentase kepemilikan institusional mayoritas dibandingkan dengan total saham. Kepemilikan institusional dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kepemilikan institusional yang dimiliki oleh institusi keuangan, seperti perusahaan investasi, bank, dan reksa, asuransi, dan lain-lain. Kepemilikan institusional dilambangkan dengan simbol "KI".

$$KI = \frac{\text{Proporsi kepemilikan institusional dengan kepemilikan saham lebih dari 5\%}}{\text{Total saham yang dimiliki perusahaan}}$$

3.1.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol dalam penelitian ini ada 4 (empat) yaitu, total penjualan, ROA, sensitivitas industri, dan keberadaan laporan keberlanjutan.

Total penjualan (\ln_SALES) adalah penilaian logaritma natural dari total penjualan untuk menilai ukuran perusahaan. ROA untuk mengukur profitabilitas perusahaan, diukur dengan laba bersih dibagi dengan total asset. Sensitivitas industri (SEN_IND) dibagi menjadi dua yaitu 1 jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan tambang dan energi, dan nol yang lainnya. Laporan keberlanjutan (*sustainability report*) menunjukkan bahwa perusahaan memiliki pengungkapan lingkungan yang lebih baik dibandingkan perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan ini dilambangkan dengan SUS_REP , diukur menggunakan variabel dummy, jika perusahaan menerbitkan laporan keberlanjutan diberi skor 1, dan 0 yang lainnya.

$$ROA = \frac{\text{laba bersih}}{\text{total asset}}$$

Tabel 3.1 Definisi Variabel

Variabel	Pred. Sig	Definnisi
Variabel Dependen (Kualitas <i>Environmental Disclosure</i>)		
DQ_COMP		Jumlah indikator <i>compliance</i> dalam <i>sustainability report</i> atau <i>annual report</i>
DQ_POLLPREV		Jumlah indikator <i>pollution prevention</i> dalam <i>sustainability report</i> atau <i>annual report</i>
DQ_PRODSTEW		Jumlah indikator <i>product stewardship</i> dalam <i>sustainability report</i> atau <i>annual report</i>
DQ_SUSTDEV		Jumlah indikator <i>sustainable development</i> dalam <i>sustainability report</i> atau <i>annual report</i>
DQ_TOTAL		Jumlah total indikator pengungkapan lingkungan (<i>compliance, pollution prevention, product stewardship, dan sustainable development</i>) dalam <i>sustainability report</i> atau <i>annual report</i>
Variabel independen		
<i>Enviromental Media</i>		
Janis-Fadner coefficient		<p>Koefisien Janis-fadner mengukur jumlah negatif dan positif referensi media dalam media <i>online</i> nasional yang berhubungan dalam isu lingkungan :</p> <p>Janis- Fadner <i>coefficient</i> = $\frac{e^2-ec}{t^2}$ if $e > c$</p> <p>$\frac{ec-c^2}{t^2}$ if $c > e$</p> <p>0 if $e = c$</p> <p>Dimana e adalah jumlah artikel positif tentang lingkungan, c adalah jumlah tentang artikel negatif tentang lingkungan, dan t adalah jumlah $e + c$</p>
MEDIA_EXIST	+	Satu jika perusahaan memiliki liputan media tentang lingkungan selama tahun tersebut, dan 0 yang lainnya
POS_MEDIA	±	Satu jika perusahaan memiliki koefisien Janis-fadner positif, dan nol yang lainnya
NEG_MEDIA	+	Satu jika perusahaan memiliki koefisien Janis-

		fadner negatif, dan nol yang lainnya
NEUT_MEDIA	±	Satu jika perusahaan memiliki koefisien Janis Fadner bernilai nol, atau liputan media netral mengenai lingkungan selama tahun tersebut, dan nol yang lainnya.
Katarteristik Dewan Komisaris		
IND	+	Jumlah dari anggota dewan komisaris yang independen (co. dewan komisaris yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan, atau anggota yang lain).
GENDER	+	Jumlah dari anggota dewan komisaris perempuan
DIRECTORSHIP	+	Jumlah anggota dewan komisaris yang memiliki pekerjaan lebih dari satu
BS	+	Jumlah semua anggota dewan komisaris
Shareholders		
KI	-	Presentase kepemilikan investor institusional (keuangan) mayoritas dibagi dengan total saham
Kontrol		
Ln_SALES	+	Log dari penjualan tahunan
ROA	+	Laba bersih dibagi total asset (<i>net income/total assets</i>)
SEN_IND	+	Satu jika perusahaan merupakan industri pertambangan dan energi, nol yang lainnya
SUS_REP	+	Satu jika perusahaan menerbitkan laporan keberlanjutan (<i>sustainability report</i>), nol yang lainnya.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel dari populasi yang ada berdasarkan kriteria. Berdasarkan metode tersebut maka kriteria penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan publik non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010-2012.

2. Perusahaan publik non-keuangan yang merupakan perusahaan *high profile industry* menurut Rupley, *et al.* (2012) yaitu : (1)Pertambangan, (2)Energi, (3)Kimia, (4)Farmasi, (5)Kosmetik dan (6)Makanan dan Minuman
3. Perusahaan publik pada poin 2 yang membuat dan menerbitkan laporan tanggung jawab sosial baik dalam laporan tahunan maupun laporan berkelanjutan selama tahun 2010-2012.

Perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan yang tergolong perusahaan *high profile industry*. Penelitian ini menggunakan perusahaan *high profile industry* karena melakukan pengolahan produk yang bersinggungan dengan alam, sehingga memiliki potensi untuk melakukan kerusakan lingkungan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari dokumentasi perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan. Dan untuk proksi *environmental media* menggunakan media *online* sebagai sarana pencarian sumber data. Data berupa laporan tahunan atau laporan tahunan yang dipublikasikan perusahaan dapat diperoleh di Pojok BEI Fakultas Ekonomika dan Bisnis atau di www.idx.co.id. Media *online* yang digunakan dalam penelitian ini adalah kompas, antaranews, republika *online*, detik.com, walhi nasional , dan liputan media yang berasal dari web perusahaan itu sendiri.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data empiris berupa sumber data yang dibuat oleh perusahaan seperti laporan tahunan perusahaan (*annual report*), laporan keberlanjutan (*sustainability report*), dan sumber data dari surat kabar nasional yang dipublikasikan secara *online*.

3.5 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan regresi berganda.

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan teknik deskriptif yang memberikan gambaran atau informasi data dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis. Analisis ini hanya bertujuan untuk menganalisis data disertai dengan perhitungan agar dapat memperjelas karakteristik data yang bersangkutan. Statistik deskriptif menunjukkan jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi (Ghozali, 2011). Nilai minimum digunakan untuk mengetahui jumlah terkecil dari data yang bersangkutan. Nilai maksimum digunakan untuk mengetahui jumlah terbesar dari data yang bersangkutan. Nilai rata-rata (*mean*) digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata dari data yang bersangkutan. Standar deviasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, data dalam penelitian ini akan diuji terlebih dahulu untuk memenuhi uji asumsi klasik. Tujuan dilakukannya uji

asumsi klasik adalah untuk mengetahui apakah data telah memenuhi asumsi klasik dan dapat diterapkan pada model regresi. Pengujian dalam uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedasitas, dan uji autokorelasi.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2011).

Pengujian normalitas data dalam penelitian ini menggunakan analisis grafik dan uji kolmogorov smirnov. Pengujian normalitas melalui analisis grafik adalah dengan cara menganalisis grafik normal *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan *plotting* data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik tersebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal (Ghozali, 2011).

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan:

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data meyebar lebih jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 20011).

Namun, metode grafik ini memiliki kelemahan yaitu pengamatan visual dari grafik tersebut terakadang menyesatkan. Oleh sebab itu dianjurkan untuk melakukan uji normalitas secara statistic. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non parametrik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S). Jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan di atas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan di bawah 0,05 maka data *residual* terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2011)

3.5.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) yang satu dengan yang lainnya. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel sama dengan nol (Ghozali, 2011).

Gejala multikolinieritas dapat dideteksi dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan VIF > 10 (Ghozali, 2011). Jadi dikatakan tidak terjadi multikolinieritas apabila nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 .

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan kepengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

Salah satu uji yang dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residual (SRESID). Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka diidentifikasi tidak terdapat heterokedastisitas (Ghozali, 2011).

Analisis menggunakan grafik plot memiliki kelemahan yang cukup signifikan oleh karena jumlah pengamatan yang mempengaruhi hasil plotting. Semakin sedikit jumlah pengamatan semakin sulit menginterpretasikan hasil

grafik plot. Oleh sebab itu, analisis menggunakan grafik plot tidak digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji statistik yaitu uji glejser. Dalam uji glejser, apabila variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hal tersebut, diamati dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% (Ghozali, 2011).

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya (Ghozali, 2011).

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu dengan *run test*. *Run test* digunakan sebagai bagian dari statistik *nonparametric* dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random (Ghozali, 2011). Model regresi dikatakan random atau acak jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka model regresi tidak terjadi autokorelasi.

3.5.3 Regresi Berganda (*Multiple Regression*)

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel bebas (independen) terhadap beberapa variabel terikat (dependen). Terdapat sepuluh persamaan regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya dapat diringkas sebagai berikut :

1. Model 1

$$\begin{aligned} \text{DQ_QUALITY} = & \alpha + \beta_1 \text{MEDIA_EXIST} + \beta_2 \text{IND} + \beta_3 \text{GENDER} + \\ & \beta_4 \text{DIRECTORSHIPS} + \beta_5 \text{BS} + \beta_6 \text{KI} + \beta_7 \text{Ln_SALES} + \\ & \beta_8 \text{ROA} + \beta_9 \text{SEN_IND} + \beta_{10} \text{SUS_REP} + e \end{aligned}$$

2. Model 2

$$\begin{aligned} \text{DQ_QUALITY} = & \alpha + \beta_1 \text{POS_MED} + \beta_2 \text{NEG_MED} + \beta_3 \text{NEUT_MED} + \\ & \beta_4 \text{IND} + \beta_5 \text{GENDER} + \beta_6 \text{DIRECTORSHIPS} + \beta_7 \text{BS} + \\ & \beta_8 \text{Ln_SALES} + \beta_9 \text{KI} + \beta_{10} \text{ROA} + \beta_{11} \text{SEN_IND} + \\ & \beta_{12} \text{SUS_REP} + e \end{aligned}$$

DQ_QUALITY terdiri dari lima variabel dependen yaitu DQ_TOTAL, DQ_COMP, DQ_POLLPREV, DQ_PRODSTEW, dan DQ_SUSDEV. Perbedaan antara model 1 dan model 2 dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Pada model 1 karakteristik dari environmental media dilambangkan dengan variabel keberadaan media (MEDIA_EXIST).
- b. Pada model 2 karakteristik dari environmental media dilambangkan dengan variabel negatif media yang diukur dengan 3 (tiga) proksi yaitu

positif media (POS_MED), negatif media (NEG_MED), dan netral media (NEUT_MED).

Dapat disimpulkan dalam penelitian ini terdapat 5 variabel dependen dengan masing-masing terdapat 2 model, sehingga, dalam penelitian ini terdapat 10 (sepuluh) model regresi.

Keterangan :

DQ_QUALITY (DQ_TOTAL, DQ_COMP, DQ_POLLPREV, DQ_PRODSTEW, dan DQ_SUSDEV)

DQ_COMP : Jumlah kualitas pengungkapan lingkungan pada tingkat *compliance*

DQ_POLLPREV : Jumlah kualitas pengungkapan lingkungan pada tingkat *pollution prevention*

DQ_PRODSTEW : Jumlah kualitas pengungkapan lingkungan pada tingkat *product stewardship*

DQ_SUSDEV : Jumlah kualitas pengungkapan lingkungan pada tingkat *sustainable development*

DQ_TOTAL : Jumlah kualitas pengungkapan lingkungan secara keseluruhan

MEDIA_EXIST : Keberadaan liputan media

POS_MEDIA : Liputan media positif

NEG_MEDIA : Liputan media negatif

NEUT_MEDIA : Liputan media netral

IND : Jumlah dewan komisaris independen

GENDER : Jumlah dewan komisaris perempuan

DIRECTORSHIP : Jumlah dewan komisaris yang memiliki pekerjaan lebih dari satu

BS : Jumlah anggota dewan komisaris (*Board Size*)

KI	:	Proporsi kepemilikan saham institusi keuangan (kepemilikan institusional)
SALES	:	logaritma natural total penjualan
ROA	:	<i>return on asset</i>
SES_IND	:	sensitivitas industri
SUS_REP	:	<i>sustainability report</i> (laporan keberlanjutan)
α	:	konstanta (<i>intercept</i>)
$\beta_1 - \beta_{12}$:	koefisien regresi
e	:	eror

3.5.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu uji statistik F, uji statistik t, dan uji koefisien determinasi (R^2).

3.5.4.1 Uji Statistik F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Apabila nilai probabilitas lebih kecil daripada 0,05, maka model regresi akan dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Selain dari nilai signifikansinya, model regresi tersebut layak digunakan dengan melihat nilai F, apabila nilai F lebih besar dari 4 maka semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

3.5.4.2 Uji koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan model menjelaskan variasi yang terjadi dalam variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R^2) berkisar antara $0 < R^2 < 1$. Nilai koefisien

determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel independen hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted R²* pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik.

Dalam kenyataan nilai *adjusted R²* dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus bernilai positif. Jika dalam uji empiris didapat nilai *adjusted R²* negatif, maka dianggap bernilai nol. Secara matematis jika nilai $R^2 = 1$, maka *adjusted R²* = 1 sedangkan jika nilai $R^2 = 0$, maka *adjusted R²* = $(1-k) / (k-n)$. Jika $K > 1$, maka *adjusted R²* akan bernilai negatif (Ghozali, 2011).

3.5.4.3 Uji Statistik t

Uji hipotesis dilakukan dengan uji t. Uji statistik t dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikansi koefisien variabel independen dalam memprediksi variabel dependen. Pengujian ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2011). Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,10 ($\alpha=10\%$). Penerimaan dan penolakan hipotesis akan dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Jika nilai signifikansi (sig) lebih besar dari 0,10 maka hipotesis ditolak.
- b. Jika nilai signifikansi (sig) lebih kecil atau sama dengan 0,10 maka hipotesis tidak dapat ditolak.